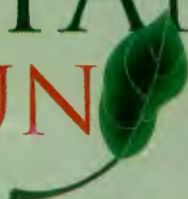


RENCANA PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2005-2009



Simpertan Jili

Siddal

631.1

DEP

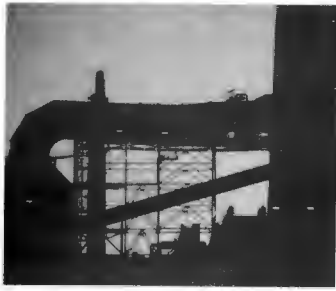
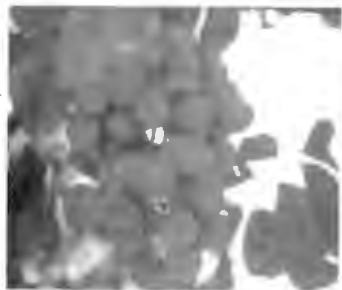
r

~~20550~~

1.7 55

Bibliografi

RENCANA PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2005-2009





**Rencana
Pembangunan Pertanian
Tahun 2005-2009**



DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan

Jakarta Selatan

ISBN : 979-582-012-5

KATA PENGANTAR

Bibliografi



Setelah menghadapi krisis tahun 1998-1999, pada saat ini sektor pertanian telah berada pada fase percepatan pertumbuhan. Salah satu tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan momentum pertumbuhan tersebut. Di balik berbagai keberhasilan yang telah dicapai, pembangunan pertanian ke depan masih dihadapkan kepada masalah-masalah kesejahteraan petani, kemiskinan, pengangguran, ancaman terhadap ketahanan pangan, infrastruktur pertanian yang kurang mendapat perhatian, investasi relatif rendah, akses pasar yang masih lemah dan lainnya.

Untuk menterjemahkan Visi dan Misi pembangunan nasional, maka disusun Rencana Pembangunan Pertanian Tahun 2005-2009. Dokumen ini menguraikan pokok-pokok pikiran pembangunan pertanian; kinerja, permasalahan dan tantangan; ruh, visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi dan kebijakan serta program dan manajemen pembangunan pertanian. Rencana Pembangunan Pertanian 2005-2009 disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya, serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global di masa depan.

Kepada seluruh jajaran Departemen Pertanian dan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian diharapkan dapat memanfaatkan buku ini, sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian di masing-masing instansi.

Jakarta, Maret 2005

Menteri Pertanian,

Dr. Ir. Anton Apriyantono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. EVALUASI PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2000-2004	3
2.1. Kinerja Sektor Pertanian	3
2.2. Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Pertanian	6
III. LINGKUNGAN STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	8
3.1. Dinamika Lingkungan Strategis	8
3.2. Permasalahan	15
3.3. Tantangan	19
IV. RUH, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	25
4.1. Ruh, Visi dan Misi	25
4.2. Tujuan	26
4.3. Sasaran	27
V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	34
5.1. Landasan: Revitalisasi Pertanian	34
5.2. Strategi Umum	34
5.3. Arah Kebijakan	38
VI. PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN	44
6.1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	44
6.2. Program Pengembangan Agribisnis	45
6.3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	47
VII. MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERTANIAN	49
7.1. Kewenangan Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian	49
7.2. Mekanisme Perencanaan	50
7.3. Pelaksanaan	50
7.4. Monitoring, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian	51
VIII. PENUTUP	52
LAMPIRAN	53



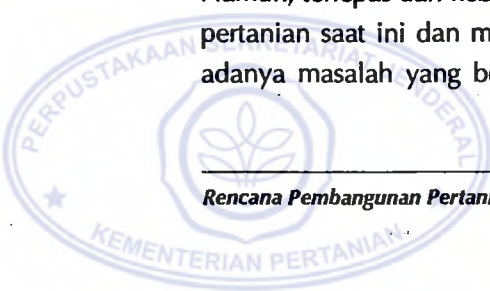
I. PENDAHULUAN

Sektor pertanian telah dan terus dituntut berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain kontribusi langsung, sektor pertanian juga memiliki kontribusi yang tidak langsung berupa efek pengganda (*multiplier effect*), yaitu keterkaitan input-output antar industri, konsumsi dan investasi. Dampak pengganda tersebut relatif besar sehingga sektor pertanian layak dijadikan sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu sangatlah tepat bila salah satu agenda pembangunan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah Revitalisasi Pertanian.

Pada masa krisis, sektor pertanian terbukti lebih tangguh bertahan dan mampu pulih lebih cepat dibanding sektor-sektor lain, sehingga berperan sebagai penyangga pembangunan nasional. Peran tersebut terutama dalam penyediaan kebutuhan pangan pokok, perolehan devisa, penyedia lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Sektor pertanian juga menjadi andalan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan melalui pengembangan usaha berbasis pertanian. Dengan pertumbuhan yang terus positif secara konsisten, sektor pertanian berperan besar dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada periode pemulihan pasca krisis, pembangunan pertanian telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Secara umum, sektor pertanian telah mampu melepaskan diri dari ancaman keterpurukan yang berkepanjangan, terlepas dari ancaman kontraksi berkelanjutan dan melepaskan diri dari perangkap "spiral pertumbuhan rendah" dan bahkan telah berada pada fase percepatan pertumbuhan menuju pertumbuhan berkelanjutan.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian pada periode tahun 2000-2004 yang memfokuskan pada upaya mengatasi dampak krisis, melalui implementasi Pembangunan Sistem dan Usaha Agribisnis sebagai *Grand Strategy* pembangunan pertanian. Namun, terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai, tantangan pembangunan pertanian saat ini dan mendatang dirasakan semakin berat. Disamping masih adanya masalah yang belum terselesaikan dari kegiatan pembangunan yang



lalu, telah timbul pula masalah baru sebagai konsekuensi perubahan lingkungan strategis global dan domestik, dan masalah yang timbul akibat krisis ekonomi yang dialami saat ini. Beberapa permasalahan pembangunan yang masih perlu mendapat prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pertanian mendatang adalah pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, penanggulangan pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Dalam rangka menjaga kesinambungan program dan mempertahankan momentum pertumbuhan serta memanfaatkan hasil-hasilnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan pembangunan pertanian yang disatu sisi merupakan kelanjutan dari program sebelumnya. Namun disisi lain diperlukan pula pemikiran-pemikiran baru untuk menyempurnakan rancangan program selanjutnya.

Isi pokok dari dokumen Rencana Pembangunan Pertanian tahun 2005–2009 mengacu kepada: (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, terutama agenda revitalisasi pertanian dan agenda-agenda lain yang terkait; (2) Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025; dan (3) kajian mengenai lingkungan strategis, permasalahan, tantangan dan tuntutan prioritas pembangunan pertanian yang berkembang. Dokumen ini merupakan acuan bagi stakeholders pembangunan pertanian, terutama jajaran birokrasi lingkup pertanian dalam melaksanakan pembangunan pertanian sesuai peran dan fungsi masing-masing. Bagi instansi lain, dokumen ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merancang kebijakan dan program untuk mendukung pembangunan pertanian.



II. EVALUASI PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2000-2004

2.1. Kinerja Sektor Pertanian

a. Pertumbuhan PDB

Selama periode tahun 2000-2003, rata-rata laju pertumbuhan tahunan PDB sektor pertanian mencapai 1,83 persen, jauh lebih tinggi dibanding periode krisis ekonomi (1998-1999) yang hanya mencapai 0,88 persen, bahkan dibanding periode tahun 1993-1997 (sebelum krisis ekonomi) yang mencapai 1,57 persen. Hingga triwulan III tahun 2004, PDB sektor pertanian tumbuh 3,23 persen terhadap triwulan yang sama tahun 2003. Subsektor tanaman bahan makanan dan perkebunan telah tumbuh lebih tinggi dari sebelum krisis namun subsektor peternakan masih belum sepenuhnya pulih kembali. Setelah melewati fase pertumbuhan rendah, sektor pertanian saat ini tengah berada pada fase percepatan pertumbuhan sebagai masa transisi menuju pertumbuhan berkelanjutan.

b. Produksi Komoditas

Pada periode yang sama, kinerja produksi komoditas tanaman pangan secara umum cukup baik. Produksi komoditas padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami peningkatan masing-masing 0,53; 3,38; 3,22; 2,81 dan 2,35 persen per tahun. Namun rata-rata laju pertumbuhan komoditas kedelai mengalami penurunan sebesar 18,48 persen per tahun. Berdasarkan angka sementara Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2004, kecuali ubi jalar, produksi seluruh komoditas tanaman pangan mengalami peningkatan. Produksi padi diperkirakan sebesar 54,06 juta ton atau meningkat 3,69 persen, jagung 11,16 juta ton atau meningkat 2,54 persen, kedelai 721 ribu ton, atau meningkat 7,40 persen, ubi kayu 19.263 juta ton, atau meningkat 3,99 persen, sedangkan ubi jalar menurun 5,13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa produksi tanaman pangan telah mengalami titik balik dari deselerasi ke akselerasi pertumbuhan.

Krisis ekonomi tahun 1998 tidak membuat produksi sayuran mengalami kontraksi, bahkan sebagian besar komoditas sayuran justru mengalami akselerasi pertumbuhan produksi. Pada tahun 2002-2003, komoditas sayuran telah kembali ke fase pertumbuhan tinggi. Pada tahun 2003, komoditas utama

sayuran antara lain bawang merah, kubis, kentang, cabai dan tomat, tumbuh pesat dengan laju 10-36 persen. Produksi buah-buahan juga tumbuh pesat dengan laju pertumbuhan antara 7,34 - 28,95 persen per tahun.

Pada tahun 2000-2003, kinerja komoditas perkebunan seluruhnya membaik, jauh lebih baik dibanding pada periode 1993-1997, kecuali untuk teh. Prestasi luar biasa terjadi pada tebu/gula yang mengalami titik balik ekstrim dari pertumbuhan negatif hingga tahun 1999, menjadi tumbuh positif. Pada tahun 2000-2003, produksi tebu/gula tumbuh dengan rata-rata laju 7,43 persen per tahun, jauh di atas pertumbuhan permintaannya.

Subsektor peternakan, juga merupakan andalan utama sumber pertumbuhan tinggi sektor pertanian. Pada tahun 2003 subsektor peternakan sudah sepenuhnya pulih dari terpaan krisis tahun 1998-1999. Tingkat produksi seluruh komoditas peternakan sudah melampaui tingkat tertinggi periode sebelum krisis, kecuali untuk daging kuda. Pada tahun 2000-2003 laju peningkatan produksi ayam broiler dan petelur berturut-turut mencapai 23,4 dan 10,27 persen per tahun, padahal saat krisis ekonomi pernah mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu masing-masing 28,23 dan 8,92 persen per tahun.

c. Ekspor dan Impor

Kinerja neraca perdagangan (*balance of trade*) komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (tidak termasuk perikanan dan kehutanan) selama periode 1995-2004 untuk produk segar dan olahan mengalami peningkatan secara konsisten. Rata-rata nilai ekspor pada periode sebelum krisis (1995-1997) mencapai 5,1 miliar dollar AS dengan nilai impor rata-rata 4,6 miliar dollar AS, sehingga surplus neraca perdagangan 0,5 juta dollar AS. Pada masa krisis (1998-1999) impor turun drastis sehingga rata-rata neraca perdagangan mengalami surplus 1,4 miliar dollar AS. Pada periode pasca krisis (2000-2004) ekspor meningkat pesat sehingga neraca perdagangan meningkat dua kali lipat menjadi 2,2 miliar dollar AS.

Nilai ekspor sampai Juni 2004 mencapai 8,6 miliar dollar AS, sedangkan nilai impor 4,7 miliar dollar AS, sehingga neraca surplus mencapai 3,97 miliar dollar AS. Surplus tahun 2004 ini terutama dicapai karena kinerja produksi padi sangat baik mencapai 54,3 juta ton, melampaui target 53 juta ton, sehingga impor beras turun dari 1,4 juta ton senilai 291 juta dollar AS pada tahun 2003 menjadi hanya 0,17 juta ton senilai 0,4 juta dollar AS tahun 2004. Nilai impor jagung menurun dari 160 juta dollar AS pada tahun 2003 menjadi 80 juta dollar AS tahun 2004. Namun nilai impor komoditas kedelai masih tetap tinggi mencapai 383 juta dollar AS, lebih tinggi dibanding tahun 2003 senilai 370 juta dollar AS.

Sementara komoditas andalan ekspor masih tetap dari subsektor perkebunan terutama kelapa sawit dan karet.

d. Kesejahteraan Petani

Krisis multi dimensi telah menyebabkan jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 melonjak menjadi 26 persen atau sekitar 32 juta orang di perdesaan dan 22 persen atau hampir 18 juta orang di perkotaan. Namun pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin telah menurun drastis menjadi 19,5 persen atau 25 juta orang di perdesaan dan 12,6 persen atau 13 juta orang di perkotaan.

Jumlah absolut anggota rumah tangga tani yang masih hidup dalam kemiskinan turun dari 26 juta orang pada tahun 1999 menjadi 20,6 juta orang pada tahun 2002. Dengan meningkatnya secara signifikan laju pertumbuhan sektor pertanian, dapat diharapkan jumlah anggota rumah tangga tani yang masih miskin pada tahun 2004 jauh lebih kecil dari pada tahun 2002. Berdasarkan data BPS, pada harga-harga konstan 1993, pendapatan tenaga kerja pertanian menurun pada tahun 1998-1999, namun meningkat konsisten selama periode tahun 2000-2003. Rata-rata pendapatan tenaga kerja pada periode tahun 2000-2003 telah melampaui nilai periode sebelum krisis (1993-1997).

Variabel lain yang kerap digunakan sebagai indikator kesejahteraan petani ialah indeks nilai tukar petani (NTP), yakni indeks rasio harga yang diterima dengan harga yang dibayar rumah tangga tani. Setelah anjlok sejak tahun 1998 hingga tahun 2000, nilai tukar petani secara nasional menunjukkan perbaikan signifikan pada tahun 2001 dan terus meningkat hingga tahun 2003. Nilai tukar petani pada tahun 2003 telah jauh melampaui titik tertinggi pada masa Orde Baru (tahun 1995). Kesimpulan terjadinya peningkatan tingkat pendapatan/kesejahteraan juga didukung oleh data mikro hasil survei lapang. Rata-rata pendapatan riil rumah tangga petani sawah di Jawa Barat tahun 2000-2002 melonjak dari Rp 2,06 juta pada tahun 1999 menjadi Rp 4,75 juta pada tahun 2002. Sedangkan di Sulawesi Selatan pendapatan petani meningkat dari Rp 1,82 juta pada tahun 1984 menjadi Rp 3,95 pada tahun 2002.

e. Ketahanan Pangan

Selama periode tahun 2000-2003, Indonesia tidak pernah mengalami masalah ketersediaan pangan. Berdasarkan perhitungan, rasio impor beberapa bahan pangan penting terhadap total penyediaan pangan menunjukkan bahwa ketergantungan impor dalam bentuk kalori per jenis bahan pangan terhadap total penyediaan kalori, secara umum relatif kecil. Pada tahun 2003, ketergantungan terhadap impor (kalori) yang berasal dari bahan pangan, berkisar antara 0 persen

pada daging ayam, telur, ubi jalar, dan ubikayu hingga 2,2 persen pada beras. Angka ketergantungan yang relatif tinggi adalah gula 1,69 persen, kedelai 1,51 persen dan jagung 1,25 persen. Dengan demikian secara umum ketahanan pangan nasional semakin mantap. Membaiknya indikator ketahanan pangan makro (nasional) juga diikuti oleh perbaikan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Setelah menurun cukup signifikan dari 2002 kalori/kapita/hari pada tahun 1996 menjadi 1852 kalori/kapita/hari pada tahun 1999, asupan energi pada tahun 2002 meningkat cukup signifikan menjadi 1986 kalori/kapita/hari. Fenomena yang sama berlaku untuk asupan protein. Setelah menurun dari 54,41 gram/kapita/hari pada tahun 1996 menjadi 48,67 gram/kapita/hari pada tahun 1999, asupan protein meningkat kembali menjadi 54,42 gram/kapita/hari pada tahun 2002.

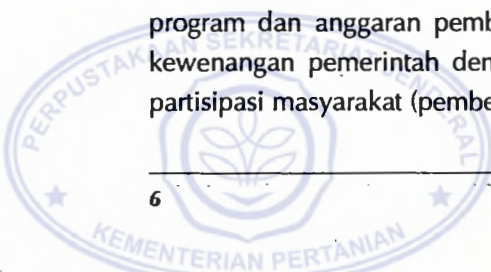
Capaian kinerja di atas tidak terlepas dari kontribusi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Eselon-1 lingkup Departemen Pertanian, serta dukungan dari berbagai instansi dan stakeholders lain.

2.2. Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Pertanian

Reformasi pembangunan yang mengarah kepada tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mengharuskan adanya penyesuaian manajemen pembangunan. Penyesuaian manajemen pembangunan pertanian dilakukan pada seluruh aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Sebagai salah satu unsur penting dalam sistem manajemen pembangunan pertanian, penyesuaian mekanisme perencanaan pembangunan dilakukan dari *top-down planning* berubah menjadi mekanisme perencanaan yang didasarkan atas dasar keterpaduan *top-down policy* dan *bottom-up planning*. Sebelum era desentralisasi, proses perencanaan pembangunan pertanian dilakukan terpusat, cenderung mekanistik dan kurang partisipatif. Dengan mekanisme ini, unit kerja di daerah cenderung sebagai pelaksana kegiatan yang ditentukan oleh unit kerja di pusat dan setiap subsektor berjalan masing-masing, sehingga kurang terkoordinasi.

Setelah desentralisasi, yaitu sejak tahun 2000, proses penyusunan program dan anggaran didasarkan kepada kewenangan yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000. Penjabaran program dan anggaran pembangunan pertanian disusun sesuai dengan peta kewenangan pemerintah dengan memberikan peluang lebih banyak kepada partisipasi masyarakat (pemberdayaan masyarakat). Dalam proses perencanaan



berdasarkan prinsip keterpaduan "*bottom up planning dan top down policy*", rancangan kegiatan pembangunan pertanian disusun secara bertahap mulai dari tingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat.

Pendekatan pembangunan pertanian dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat sebesar-besarnya. Pada era desentralisasi ini, Departemen Pertanian mengalokasikan antara 70-80 persen anggarannya kepada daerah melalui pola pendanaan dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi tersebut sebagian besar dialokasikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat antara lain melalui pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan dilakukan oleh Dinas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) daerah. Bantuan diberikan langsung melalui rekening kelompok dalam rangka penguatan modal kelompok pelaku agribisnis. Dana tersebut merupakan dana pinjaman yang selanjutnya digulirkan kepada anggota lain dalam kelompok untuk memperkuat kelembagaannya.

Sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan program, mulai tahun 2001 telah dibangun Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV). Dalam SIMONEV, substansi yang dievaluasi tidak hanya menyangkut aspek fisik dan keuangan, tetapi mencakup kinerja sesuai dengan standar evaluasi menggunakan logframe kinerja (input, output, outcome, benefit, dan impact). Simonev didisain kompatibel untuk penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Untuk merespon tuntutan pembangunan, sejak tahun 2000, telah dilakukan perubahan struktur organisasi Departemen Pertanian yaitu dari struktur berdasarkan komoditas menjadi struktur berdasarkan pendekatan sistem agribisnis. Pada tahun 1997 Unit Eselon I Departemen Pertanian (di luar Staf Ahli) berjumlah 10 Unit, kemudian berkurang menjadi 8 Unit pada periode 1998-1999 dan bertambah lagi menjadi 12 Unit pada periode 2000-2004. Dalam periode 2000-2004, tugas pokok dan fungsi Unit Eselon I lingkup Departemen Pertanian dibagi sesuai dengan unsur/komponen dari sistem agribisnis. Struktur Organisasi yang menggunakan pendekatan sistem agribisnis tersebut, menuntut peningkatan koordinasi yang kuat secara fungsional antar Unit Eselon I.

III. LINGKUNGAN STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

3.1. Dinamika Lingkungan Strategis

a. Internasional

(1) Liberalisasi Pasar Global dan Ketidakadilan Perdagangan Internasional

Kesadaran akan manfaat peranan perdagangan internasional bagi kesejahteraan penduduknya mendorong sejumlah negara bertetangga membentuk organisasi kerja sama ekonomi regional yang memiliki kepentingan untuk membangun kekuatan ekonomi bersama. Beberapa kerjasama ekonomi negara yang menonjol yaitu *North American Free Trade Area* (NAFTA), *European Union* (EU), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan yang lebih luas lagi adalah *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC). Melalui integrasi ekonomi, diharapkan hambatan-hambatan perdagangan (trade barriers), berupa tariff maupun non-tariff barrier, yang mungkin ada di antara sesama negara anggota dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan, sehingga lalu lintas atau mobilitas perdagangan barang dan jasa serta investasi antar negara di dalam suatu kawasan menjadi semakin lancar (*borderless*).

Pembentukan ekonomi kawasan ini diperkirakan akan menimbulkan ketimpangan ekonomi baru yang bukan lagi dalam hubungan antar negara namun dalam cakupan yang lebih luas lagi, yaitu antar kawasan/regional. Ketimpangan antar kawasan ini dapat terjadi karena adanya proses pematangan kawasan ekonomi yang berbeda satu dengan lainnya. Salah satu kawasan ekonomi yang diperkirakan akan sangat kuat adalah Uni Eropa (*European Union*). Kawasan ini sudah mencapai suatu tahapan penyatuan mata uang (mata uang tunggal Euro), yaitu suatu tahapan yang paling maju dalam implementasi integrasi ekonomi. Kondisi ini akan semakin menyulitkan ekspor produk pertanian Indonesia dan negara-negara lain di luar Eropa, karena sudah pasti akan mendapat perlakuan yang berbeda (peraturan ekspor-impor yang sangat ketat) dengan negara-negara yang berada di kawasan yang sama. Untuk menghadapi masalah ini, Indonesia harus mulai mengembangkan produk pertanian olahan dan mengutamakan pangsa pasar dalam negeri yang potensinya juga sangat besar.

Sebagai konsekuensi dari negara yang turut meratifikasi perjanjian *General on Tariff and Trade* dan *World Trade Organization (GATT/WTO)*, Indonesia harus mengikuti aturan yang telah disepakatinya. Pada krisis ekonomi tahun 1998, sesuai dengan rekomendasi IMF, Indonesia telah menurunkan seluruh tarif bea masuk komoditas pertanian. Komitmen menghilangkan kebijakan ekonomi dan perdagangan yang dapat menimbulkan distorsi pasar ternyata tidak dilaksanakan oleh semua negara, sehingga petani Indonesia dihadapkan pada persaingan yang tidak adil dengan petani dari negara lain yang dengan mudah mendapat perlindungan tarif dan non-tarif serta subsidi langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus menerapkan kebijakan proteksi sekaligus promosi terhadap produk-produk pertanian strategis antara lain beras, gula, jagung dan kedelai. Kebijakan proteksi yang dapat dilakukan antara lain penetapan tarif impor dan pengaturan impor, subsidi sarana produksi, pengaturan harga output maupun subsidi bunga kredit untuk modal usahatani. Untuk kebijakan promosi pemerintah memfasilitasi upaya-upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, perbaikan kualitas dan standarisasi produk pertanian, peningkatan akses pasar melalui kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Perubahan Sistem dan Manajemen Produksi

Pada awal abad XXI diperkirakan akan terjadi perubahan radikal dalam struktur pasar dan kesempatan kerja yang berimplikasi pada pembentukan pasar baru, yaitu: (1) pada saat itu, kebutuhan dasar manusia telah tercukupi dan selera manusia bergeser pada kebutuhan sekunder dan tersier, sehingga kecenderungan ke depan, pasar jasa akan berkembang lebih cepat dibanding pasar barang; (2) pendapatan masyarakat makin tinggi dan lebih mengutamakan aktualisasi kepuasannya, sehingga segmentasi pasar makin mengarah pada kelompok individu yang makin kecil; dan (3) terjadi pergeseran permintaan antar individu dalam pasar barang dan jasa yang sama.

Sejalan dengan semakin ketatnya persaingan untuk memperoleh pangsa pasar, para pelaku usaha mengembangkan strategi pengelolaan rantai pasokan (*Supply Chain Management, SCM*) yang mengintegrasikan para pelaku dari semua segmen rantai pasokan secara vertikal ke dalam usaha bersama berlandaskan kesepakatan dan standarisasi proses dan produk yang bersifat spesifik untuk setiap rantai pasokan. Kunci daya saing produk antar rantai pasokan itu adalah efisiensi pada setiap segmen rantai pasokan dan keterkaitan fungsional antar segmen dalam memelihara konsistensi setiap pelaku dalam memenuhi kesepakatan dan standar yang digunakan. Untuk menciptakan hal tersebut diperlukan integrasi

vertikal antar segmen rantai pasokan dan integrasi horizontal antar pelaku dalam satu segmen, misalnya integrasi diantara para produsen, diantara para distributor, dan diantara para pengumpul di dalam satu rantai pasokan yang sama.

Kesepakatan internasional tentang perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HaKI) melarang perusahaan domestik untuk meniru teknologi dan merek dagang yang telah dipasarkan oleh perusahaan asing. Hal ini akan mendorong komersialisasi HaKI secara global. Perusahaan domestik yang menggunakan HaKI dan merek dagang asing harus membayar royalti berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagai implikasinya, perusahaan-perusahaan multinasional akan merambah ke pasar domestik baik melalui investasi langsung maupun melalui kemitraan rantai-usaha (franchising), maupun dalam bentuk sewa-menyewa merek dagang. Usaha franchising dan sewa merek dagang dalam bidang produksi barang-barang konsumsi domestik, seperti ayam goreng dan hamburger, akan meningkatkan perubahan pola konsumsi dan menimbulkan persaingan ketat dengan produk asli nasional. Mekanisme ini juga merupakan salah satu wahana baru bagi perusahaan multinasional untuk menguasai atau mengendalikan sektor agribisnis Indonesia. Disamping mengandung aspek negatif, franchising dan sewa merek dagang dapat bermanfaat dalam meningkatkan daya saing dan perluasan pangsa pasar produk-produk pertanian, yang berarti berdampak positif bagi perkembangan agribisnis di dalam negeri.

(3) Perwujudan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (Millenium Development Goals)

Pada tahun 1996, melalui pertemuan *World Food Summit* (WFS), dunia telah bersepakat untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi setiap orang dan menghapuskan penduduk yang kelaparan di seluruh negara. Sasarannya adalah mengurangi jumlah penduduk rawan pangan menjadi setengahnya paling lambat tahun 2015. Dengan jumlah penduduk yang rawan pangan di dunia tahun 1996 diperkirakan sekitar 800 juta jiwa, maka sasaran pengurangannya sebesar 400 juta jiwa selama 20 tahun, atau rata-rata 20 juta jiwa per tahun. Pada tahun 2002, melalui pertemuan yang sama di Roma, dunia kembali mempertegas dan memperbarui komitmen global yang dibuat dalam Deklarasi Roma 1996. Karena kinerja pencapaian sasaran dalam lima tahun pertama tidak memuaskan, maka pertemuan WFS 2002 memutuskan untuk meningkatkan sasaran pengurangan penduduk rawan pangan sejak tahun 2002 menjadi rata-rata sekitar 22 juta jiwa per tahun.



Salah satu komitmen penting dalam Deklarasi Roma 2002 adalah penegasan pentingnya pembangunan pertanian dan perdesaan dalam mengikis kelaparan dan kemiskinan. Dunia menyadari bahwa pembangunan pertanian dan perdesaan mempunyai peran kunci dalam pemantapan ketahanan pangan, karena 70 persen penduduk miskin dunia hidup di perdesaan dan mengandalkan sumber penghidupannya dari sektor pertanian. Gambaran kondisi ini ternyata sangat relevan dengan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada puncak krisis ekonomi tahun 1998, jumlah penduduk miskin hampir mencapai 50 juta jiwa dan sekitar 64,4 persen tinggal di perdesaan. Pada tahun 1999, saat ekonomi menuju pemulihan, jumlah penduduk miskin turun menjadi sekitar 37 juta jiwa dan sekitar 66,8 persen tinggal di perdesaan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan hanya dapat dilakukan melalui pembangunan pertanian dan perdesaan yang berkelanjutan, yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian, produksi pangan dan daya beli masyarakat.

(4) Kemajuan Pesat dalam Penemuan dan Pemanfaatan Teknologi

Kemajuan pesat terjadi di bidang bioteknologi tanaman dan hewan yang didukung dengan kemajuan ilmu biologi molekuler dan berbagai ilmu pendukungnya. Pemetaan genom berbagai organisme, keberhasilan transformasi dan regenerasi organisme hasil rekayasa genetik (*genetically modified organism/ GMO*) membuka peluang bagi pengembangan industri berbasis sumberdaya hayati. Penggunaan GMO dalam kaitan dengan keamanan pangan dan keamanan hayati masih kontroversial. Tiadanya pengetahuan konseptual dan empiris yang kuat dan meyakinkan menghasilkan sikap ragu-ragu dari penentu kebijakan terhadap GMO. Maka negara-negara di dunia menempuh kebijakan *permissive policy* atau *precautionary policy* terhadap penggunaan GMO. Situasi yang kontroversial tersebut menyulitkan posisi negara-negara berkembang, berupa tekanan dari negara-negara donor, organisasi dan perusahaan swasta multinasional terkait dengan penggunaan GMO.

Di bidang alat dan mesin pertanian, dalam menghadapi persaingan telah dikembangkan alat dan mesin untuk budidaya berupa robot. Di bidang pasca panen telah dikembangkan teknologi tinggi seperti penginderaan mutu produk tanpa merusak produk tersebut dengan menggunakan *image analyzer* untuk produk pertanian bernilai komersial tinggi. Ekspansi cepat dari penggunaan satelit dalam pengumpulan data, termasuk *Geographical Information System* (GIS), dapat digunakan dalam penelitian tata ruang berkaitan dengan produksi dan distribusi komoditas pertanian, pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan pengentasan kemiskinan.

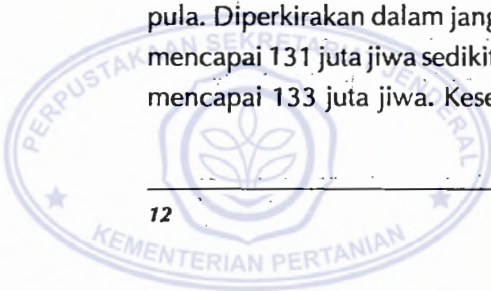
Secara umum posisi status teknologi Indonesia pada beberapa komoditas pertanian masih relatif tertinggal dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN. Untuk padi dan unggas Indonesia lebih unggul dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara maupun Asia Tengah. Namun demikian untuk komoditas perkebunan relatif tertinggal dari Malaysia dan hortikultura tertinggal dari Thailand. Untuk produk olahan pangan, produk Indonesia relatif tertinggal dibanding dengan Thailand dan Vietnam. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perhatian pemerintah yang lebih konsisten dalam membangun rantai agribisnis komoditas dari hulu ke hilir sampai dengan kemudahan dalam pemasaran produk segar maupun olahannya.

b. Nasional

(1) Dinamika Permintaan Pangan dan Bahan Baku Industri

Dinamika penduduk Indonesia ditinjau dari kualitas, pasar tenaga kerja, tingkat pendidikan, mobilitas, dan aspek gender akan sangat berpengaruh terhadap keragaan pembangunan pertanian di masa mendatang. Dalam kaitan ini ada 3 (tiga) aspek yang perlu mendapat perhatian lebih yaitu: (a) meningkatnya permintaan terhadap produk-produk pertanian, baik dalam jumlah, kualitas, dan keragamannya, (b) meningkatnya ketersediaan tenaga kerja, dan (c) meningkatnya tekanan permintaan terhadap lahan untuk penggunaan non-pertanian (pemukiman, tapak industri, infrastruktur ekonomi). Meningkatnya permintaan terhadap produk-produk pertanian dapat dipandang sebagai peluang sekaligus sebagai tantangan pembangunan pertanian. Peningkatan permintaan mengandung arti tersedianya pasar bagi produk-produk pertanian. Di sisi lain, peningkatan permintaan produk pertanian akan menimbulkan tekanan yang lebih besar untuk memacu peningkatan produksi.

Walau melimpahnya ketersediaan tenaga kerja di perdesaan kondusif bagi pertumbuhan sektor pertanian, namun di sisi lain merupakan beban bagi sektor pertanian karena pendapatan buruh tani dan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian semakin sulit ditingkatkan. Selain itu, melimpahnya tenaga kerja di sektor pertanian justru menciptakan persoalan baru yaitu terjadinya fragmentasi lahan dan menurunnya luas penguasaan lahan per rumah tangga yang akan melahirkan lebih banyak kemiskinan di sektor pertanian untuk masa yang akan datang. Sebagai akibatnya, penduduk miskin di sektor pertanian akan melimpah pula. Diperkirakan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan penduduk perdesaan mencapai 131 juta jiwa sedikit lebih rendah dibanding penduduk perkotaan yang mencapai 133 juta jiwa. Kesenjangan perekonomian perdesaan dan perkotaan



masih tetap tinggi, sehingga penduduk miskin di perdesaan tetap lebih banyak dibanding perkotaan. Perkiraan ini menunjukkan perlunya pergeseran nyata dalam hal penanganan masalah kemiskinan, dan kerawanan pangan. Kondisi ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa penanganan masalah kemiskinan dan ketahanan pangan dalam lima tahun ke depan akan tetap menjadi prioritas utama.

(2) Kelangkaan dan Degradasi Kualitas SDA

Ada dua permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintah berkaitan dengan masalah konversi lahan. Pertama, sangat timpangnya land rent antar wilayah (Jawa vs Luar Jawa; kota vs desa; sawah vs lahan kering), yang menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi terkonsentrasi di Jawa, di lahan sawah dan di perkotaan. Kedua, tingginya laju urbanisasi. Meningkatnya permintaan lahan akibat pertumbuhan penduduk selain menyebabkan penurunan luas baku lahan pertanian juga meningkatkan intensitas usahatani di daerah airan sungai (DAS) hulu. Penurunan luas baku lahan pertanian, khususnya lahan sawah, yang telah berlangsung sejak paruh kedua dekade 1980-an, saat ini cenderung semakin besar seiring dengan peningkatan konversi ke non-pertanian, khususnya di pulau Jawa. Pada beberapa tahun terakhir, luas baku lahan sawah di luar Jawa juga telah mengalami penurunan pula.

Dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan pangan juga meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan pangan telah dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian pangan. Salah satu dampak dari ekstensifikasi adalah penggundulan hutan. Luas hutan Indonesia menurun dari 65 persen dari total daratan pada tahun 1985 menjadi hanya 47 persen pada tahun 2000. Namun di Pulau Jawa, konversi lahan sawah irigasi menjadi pemukiman dan tapak industri terus berlangsung dengan akselerasi yang makin meningkat. Dampak dari penggundulan hutan dan konversi lahan tersebut antara lain berubahnya iklim secara global, erosi, banjir dan kekeringan.

Penurunan luas baku sawah di daerah hilir pada kondisi jumlah petani tetap bahkan bertambah, mendorong peningkatan intensitas usahatani di daerah hulu yang berakibat pada penurunan kualitas DAS. Penurunan kualitas DAS menyebabkan efisiensi saluran irigasi menurun dan saat ini penurunan efisiensi saluran irigasi tersebut makin bertambah karena kurangnya pemeliharaan dan rehabilitasi yang disebabkan terbatasnya dana pemerintah. Penurunan efisiensi saluran irigasi menyebabkan melambatnya perkembangan produktivitas pangan di lahan sawah. Perpaduan antara penurunan luas baku lahan dan efisiensi saluran irigasi menyebabkan kapasitas produksi pangan nasional mengalami penurunan.

(3) Manajemen Pembangunan: Otonomi Daerah dan Partisipasi Masyarakat

Otonomi Daerah. Seiring dengan pelaksanaan era otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001, telah terjadi beberapa perubahan penting yang berkaitan dengan peran pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah yang sebelumnya sangat dominan, saat ini berubah menjadi fasilitator, stimulator atau promotor pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian pada era otonomi daerah akan lebih mengandalkan kreativitas rakyat di setiap daerah. Selain itu, proses perumusan kebijakan juga akan berubah dari pola *top down* dan sentralistik menjadi pola *bottom up* dan desentralistik. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan akan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya akan menangani aspek-aspek pembangunan pertanian yang tidak efektif dan tidak efisien ditangani oleh pemerintah daerah atau menangani aspek-aspek pembangunan pertanian yang menyangkut kepentingan beberapa daerah dan nasional. Dengan format lembaga pemerintah yang demikian maka pengelolaan ketahanan pangan akan semakin kompleks. Oleh karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, masalah ketahanan pangan nasional mestinya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemantapan sistem ketahanan pangan merupakan salah satu tantangan serius di masa mendatang.

Partisipasi Masyarakat. Tuntutan jaman menghendaki pergeseran peranan masyarakat yang lebih dominan daripada masyarakat. Dengan demikian, reformasi total menuntut perlunya segera melaksanakan rekonstruksi kelembagaan pemerintahan publik berdasarkan prinsip *good governance* dengan tiga karakteristik utama, yaitu kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan pembangunan dirancang secara transparan dan melalui debat publik, dilaksanakan secara transparan pula dan diawasi oleh publik, sedangkan pejabat pelaksana bertanggung jawab penuh atas keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dengan begitu, kebijakan pembangunan akan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak (demokratis) dan praktek KKN menjadi semakin sulit dilakukan. Demokratisasi kebijakan pembangunan dan pencegahan KKN melalui *good governance* sangat bermanfaat untuk merangsang biaya ekonomi tinggi dan distorsi pasar (monopoli dan monopsoni) akibat kesalahan kebijakan. Dengan demikian, perekonomian akan lebih efisien dan pertumbuhan kegiatan bisnis berdasarkan pada keunggulan kompetitif riilnya, bukan karena proteksi atau dukungan pemerintah.

3.2. Permasalahan

Pembangunan pertanian dihadapkan kepada sejumlah permasalahan, yaitu:

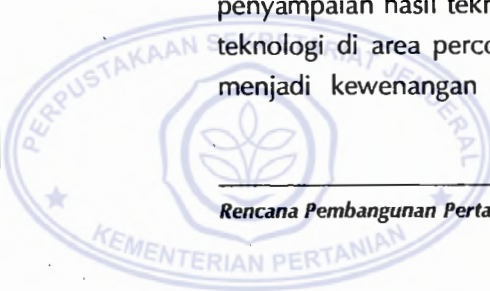
a. Keterbatasan dan Penurunan Kapasitas Sumberdaya Pertanian

Pembangunan pertanian dihadapkan kepada permasalahan permintaan produk pertanian terutama pangan yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, sementara kapasitas sumberdaya alam pertanian terutama lahan dan air terbatas dan bahkan semakin menurun. Luas baku lahan pertanian semakin menurun karena pembukaan lahan pertanian baru sangat lambat sementara konversi lahan pertanian terus meningkat. Masalah konversi lahan cukup berat terutama di Jawa. Setiap tahun sekitar 40.000 hektar lahan sawah produktif di Jawa dikonversi untuk kegiatan non-pertanian. Sementara ini masalah tersebut diatasi dengan meningkatkan intensitas tanam khususnya di Jawa, sedangkan untuk luar Jawa diatasi dengan pencetakan sawah baru. Namun selama 10 tahun terakhir, luas panen padi stagnan dibawah 12 juta hektar. Sumber air untuk pertanian semakin langka akibat kerusakan alam, terutama di daerah aliran sungai (DAS). Sementara itu, kompetisi pemanfaatan air juga semakin ketat dengan meningkatnya penggunaan air untuk rumah tangga dan industri. Besarnya tekanan penambahan penduduk terhadap lahan berakibat pemilikan dan penggarapan semakin terfragmentasi, sehingga jumlah petani gurem meningkat dengan rata-rata pemilikan lahan yang semakin kecil.

Prioritas kegiatan periode 2005-2009 untuk mengatasi masalah ini antara lain: (1) perluasan sawah/lahan pertanian baru, dan (2) koordinasi dengan instansi terkait untuk mengurangi laju konversi. Khusus untuk komoditas perkebunan, hortikultura, dan ternak kecuali ruminansia, produksi masih dapat ditingkatkan, sehingga permasalahan keterbatasan lahan tidak separah seperti yang dihadapi oleh komoditas pangan.

b. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan Kurang Tepat Sasaran

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih lemah karena lambatnya diseminasi teknologi baru (*invention*) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (*innovation*) di tingkat petani. Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, sistem penyampaian hasil teknologi dilakukan oleh penyuluh melalui proses aplikasi teknologi di area percontohan. Pada era desentralisasi, kegiatan penyuluhan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan permasalahan pada sistem



penyampaian teknologi menjadi lebih kompleks akibat kurangnya perhatian pemerintah daerah pada fungsi penyuluhan pertanian. Institusi penyuluhan dianggap rendah kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tercermin pada merosotnya jumlah tenaga penyuluh yang tercatat berjumlah 36.626 orang di masa sebelum desentralisasi menjadi 19.636 orang pada akhir tahun 2003. Hubungan keterkaitan antara peneliti, penyuluh, dan petani dinilai masih lemah. Oleh karena itu untuk tahun 2005–2009 perlu adanya penataan kembali fokus dan prioritas penelitian serta sistem diseminasi yang mampu menjawab permasalahan petani disertai dengan revitalisasi penyuluhan pertanian, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi petani.

c. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha Terutama Permodalan;

Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani. Usaha pertanian yang sebagian besar berupa petani gurem dan kecil dihadapkan kepada keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh: (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan pada usaha komersial lain (di luar agribisnis). Sistem perbankan selama ini bukan saja kurang mendukung ekonomi perdesaan khususnya pertanian, bahkan cenderung menghisap modal (*capital drain*) dari daerah perdesaan.

Selama ini peningkatan akses petani terhadap permodalan telah diupayakan melalui kegiatan/proyek antara lain: Proyek Peningkatan Pendapatan Petani/ Nelayan Kecil (P4K), Lembaga Usaha Ekonomi Produktif (LUEP), BLM, dana bergulir, Kredit Usaha Tani (KUT, diganti Kredit Ketahanan Pangan =KKP). Selain itu, instansi lain juga turut memfasilitasi peningkatan akses permodalan, dengan berbagai kegiatan, antara lain pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), lembaga keuangan mikro perdesaan, BPR, dan BRI Unit Desa. Semua kegiatan di atas telah memberikan hasil yang baik, namun masih perlu terus ditingkatkan dengan target penerima diperluas menjangkau ke seluruh petani.

Kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah permodalan antara lain: (1) pengembangan kerjasama bank syariah pertanian, melalui penyediaan

dana APBN sebagai penjamin, (2) pengembangan lembaga keuangan mikro di perdesaan, dan (3) pemberdayaan petani melalui pola BLM.

d. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran yang Belum Adil

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang memadai seperti: ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa. Sistem pemasaran yang belum adil terkait dengan keterbatasan modal yang menyebabkan petani banyak terjebak dalam sistem ijon yang melemahkan posisi tawar mereka. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga seringkali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen. Kondisi ini diperburuk oleh membanjirnya produk impor di pasar domestik sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan, sehingga hanya beras dan gula yang mendapat perlindungan harga dari pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, pasar lelang, contract farming, yang umumnya belum memberikan hasil yang optimal. Kebijakan proteksi dan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit antara lain: (1) penerapan tarif, (2) pemberian subsidi, dan (3) promosi ekspor.

e. Kualitas, Mentalitas, dan Keterampilan Sumberdaya Petani Rendah

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Selama 10 tahun terakhir kemajuan pendidikan berjalan lambat. Tahun 1992, 50 persen tenaga kerja di sektor pertanian tidak tamat SD, 39 persen tamat SD, sedangkan yang tamat SLTP hanya 8 persen (BPS, 1993). Tahun 2002, yang tidak tamat SD menjadi 35 persen tamat SD 46 persen dan tamat SLTP 13 persen (BPS, 2003). Rendahnya mentalitas petani antara lain dicirikan oleh usaha pertanian yang berorientasi jangka pendek, mengejar keuntungan sesaat, serta belum memiliki wawasan bisnis luas. Selain itu banyak petani menjadi sangat tergantung pada bantuan/pemberian pemerintah. Keterampilan petani yang rendah terkait dengan rendahnya pendidikan dan kurang dikembangkannya kearifan lokal (*indigenous knowledge*).

Selama ini masalah di atas diatasi melalui peningkatan kemampuan SDM petani dan aparat melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Untuk mendukung kegiatan tersebut sarana yang digunakan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Daerah seperti Balai Diklat, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, dan Sekolah Pembangunan Pertanian.

Ketertinggalan petani dalam hal pendidikan diatasi dengan pendekatan penyeteraan pendidikan yang selanjutnya dikaitkan dengan pelatihan keterampilan berusaha. Disamping itu, berbagai upaya penguatan kapasitas petani juga perlu dilakukan terutama dalam hal pengembangan sikap kewirausahaan, kemampuan dalam pemasaran dan manajemen usaha.

Saat ini, keberadaan kelembagaan petani sangat lemah. Kelompok tani yang banyak dibentuk selama periode 1980-an dalam mengejar swa-sembada beras sudah banyak yang tidak berfungsi, mungkin hanya tinggal nama kelompok. Intensitas dan kualitas pembinaan terhadap kelompok pasca otonomi daerah jauh berkurang karena sistem penyuluhan yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Selama ini pengembangan kelembagaan petani umumnya berorientasi keproyekan. Kelompok tani hanya aktif pada saat proyek masih berjalan. Setelah masa proyek berakhir, umumnya kelompok tani yang dibentuk menjadi tidak aktif. Pembentukan kelompok tani seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Kondisi kelompok tani saat ini juga dinilai sangat buruk karena berbagai instansi pemerintah masing-masing membentuk kelompok tani/kelembagaan tani untuk pelaksanaan kegiatan proyek mereka. Hal ini menyebabkan timbulnya banyak kelompok tani yang tumpang tindih.

Berkaitan dengan hal ini, revitalisasi sistem penyuluhan perlu segera dilaksanakan agar fungsi PPL sebagai pembina kelompok tani dapat kembali berjalan dengan baik. Disamping itu, kelembagaan petani yang ada saat ini perlu ditata dengan baik. Koordinasi ditingkat pusat dalam pembinaan kelompok tani perlu ditingkatkan agar kegiatan yang melibatkan petani tidak tumpang tindih. Pengembangan kelompok tani agar dilakukan dengan pendekatan pembangunan masyarakat (*community development*).

g. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Terkait Dan Birokrasi

Kinerja pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh keterpaduan diantara subsistem pendukungnya, yaitu mulai dari subsistem hulu (industri agro-input, agro-kimia, agro-otomotif), subsistem budidaya usahatani (on-farm), subsistem hilir (pengolahan dan pemasaran) dan subsistem pendukung (keuangan, pendidikan, dan transportasi). Keterkaitan antar subsistem sangat erat namun penanganannya terkait dengan kebijakan berbagai sektor. Sementara itu, Departemen Pertanian hanya memiliki kewenangan dalam aspek budidaya/ usahatani. Berbagai kebijakan yang terkait dengan produk pertanian sering tidak

harmonis dari hulu hingga ke hilir, seperti kasus penanganan impor produk pertanian (paha ayam, daging ilegal, benih kapas transgenik).

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan komitmen tentang peranan sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Apabila disepakati bahwa sektor pertanian merupakan penggerak utama ekonomi nasional maka koordinasi antar instansi menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun kebijakan maupun implementasinya. Untuk itu perlu perbaikan manajemen pembangunan pertanian dengan mengacu pada UU dan Peraturan Pemerintah.

h. Kebijakan Makro Ekonomi Yang Belum Berpihak Kepada Petani

Salah satu faktor penting yang menentukan kelanjutan dan kemampuan daya saing usaha pertanian adalah adanya kebijakan makro yang kondusif. Saat ini kebijakan makro ekonomi baik fiskal, moneter, perdagangan, maupun prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional dinilai belum kondusif bagi keberlanjutan dan kemampuan daya saing usaha pertanian.

Kebijakan pemerintah yang belum memihak sektor pertanian antara lain: (1) penerapan pajak ekspor komoditas pertanian yang bertujuan untuk mendorong industri pengolahan produk pertanian dalam negeri; (2) kredit perbankan yang disediakan pemerintah, porsi terbesar diserap oleh pengusaha konglomerat, sisanya adalah untuk koperasi, usaha kecil menengah termasuk petani; (3) alokasi dana APBD untuk pembangunan sektor pertanian kurang memadai; (4) beberapa daerah menarik biaya retribusi yang tinggi termasuk pada komoditas pertanian sehingga mengurangi daya saing dan menjadi penghambat dalam investasi di sektor pertanian; (5) pembangunan sarana dan prasarana lebih besar di perkotaan dibanding dengan perdesaan; dan (6) liberalisasi perdagangan telah menyebabkan membanjirnya produk pertanian yang disubsidi berlebih oleh negara maju membuat petani kita tidak mampu bersaing. Untuk itu diperlukan: (a) advokasi kebijakan dengan instansi terkait, dan (b) dukungan legislatif dan stakeholders lainnya.

3.3. Tantangan

Pada periode 2005-2009, terdapat delapan tantangan yang paling mendesak untuk segera ditangani, yaitu:

a. Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian

Tingginya laju konversi lahan pertanian subur di Jawa pada umumnya dan sekitar daerah perkotaan khususnya, mengharuskan kita memanfaatkan lahan-

lahan yang relatif kurang subur dan marjinal. Pengembangan kawasan irigasi baru berskala besar untuk lahan pangan juga semakin sulit. Disamping semakin langkanya sumber air dan luas lahan yang diairi, lahan tidur dan lahan guntai juga semakin meningkat akibat sistem pemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang tidak adil. Untuk itu dituntut kemampuan mengelola sumberdaya dengan ditunjang oleh teknologi untuk memanfaatkan lahan kurang subur dan marjinal dengan skala kecil. Pada bagian lain, dituntut pula kebijakan yang memberikan rasa keadilan dalam pemanfaatan lahan pertanian, baik dalam kepemilikan maupun pengusahaannya, sehingga tidak terjadi lahan guntai yang menyebabkan banyak lahan produktif tidak dimanfaatkan (lahan tidur). Diperlukan peninjauan kembali UU Pokok Agraria dan UU Sumberdaya Air yang memungkinkan dapat dilakukannya pendayagunaan lahan secara optimal.

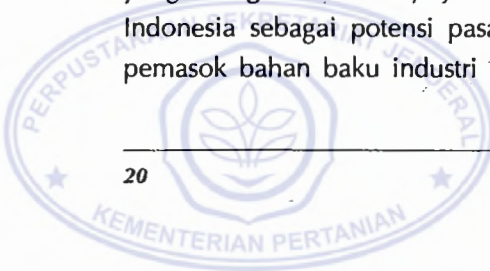
Kegiatan yang telah dilakukan selama ini dan perlu diintensifkan di masa mendatang, antara lain (1) pengembangan lahan rawa, lebak, lahan marjinal, (2) pengembangan zona agro-ekologi, dan (3) rehabilitasi lahan marjinal dan daerah aliran sungai (DAS).

b. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Penyediaan Bahan Baku Industri

Ketahanan pangan merupakan kemampuan untuk menjamin seluruh penduduk memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan juga halal, yang didasarkan pada optimasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya domestik. Indikator kemandirian pangan salah satunya adalah tingkat ketergantungan ketersediaan pangan nasional terhadap impor.

Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia mempunyai pangsa pasar domestik yang sangat besar. Kondisi ini diperkuat dengan masih adanya peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya produktif pertanian. Indonesia memiliki berbagai keunggulan komparatif di sektor pertanian. Namun, hingga kini pasokan pangan domestik belum mampu memenuhi kebutuhan pangan (beras, jagung, kedelai, kacang tanah dan gula) dalam negeri.

Selain pemenuhan kebutuhan pangan, sektor pertanian juga berpeluang dalam penyediaan bahan baku industri. Penduduk Indonesia yang besar merupakan pangsa pasar untuk komoditas pertanian. Disatu sisi, letak geografis yang strategis dan besarnya jumlah penduduk menyebabkan negara lain melihat Indonesia sebagai potensi pasar. Di sisi lain, Indonesia berpeluang sebagai pemasok bahan baku industri berbasis pertanian baik dalam negeri maupun



internasional. Upaya yang telah, sedang dan terus perlu dilakukan dalam mewujudkan kemandirian pangan dan penyediaan bahan baku industri adalah peningkatan produksi dan akses, perbaikan sistem distribusi, dan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pola pangan tertentu.

c. Penurunan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (tidak termasuk kehutanan dan perikanan) pada tahun 2003 mencapai 42,23 persen dari total tenaga kerja nasional atau sekitar 36 juta orang. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 40 juta orang. Kalau sektor pertanian mampu tumbuh 3 persen per tahun, maka sektor ini mampu menyerap tambahan tenaga kerja sekitar 6 juta orang per tahun. Penyerapan ini akan lebih besar lagi apabila sektor pertanian yang diperhitungkan mencakup industri olahan dan jasa lainnya. Hal ini berarti bahwa dari aspek mengatasi pengangguran sektor pertanian sangat potensial walaupun disisi lain, pendapatan tenaga kerja non-pertanian tiga kali lebih besar dibanding pertanian. Untuk menjawab tantangan ini, upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah pengembangan agro-industri di perdesaan dan pembukaan lahan pertanian baru terutama di luar Jawa.

d. Operasionalisasi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan pertanian berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya pengelolaan sumberdaya dan usaha pertanian melalui penerapan teknologi pertanian dan kelembagaan secara berkesinambungan bagi generasi kini dan masa depan. Kesinambungan usaha dapat diartikan bahwa usaha tani tersebut dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi petani dan keluarganya, sehingga pemilihan jenis komoditas dan usaha harus yang bernilai ekonomis, pasar tersedia dan produksi kontinyu.

Pembangunan pertanian juga harus mengindahkan aspek kelestarian lingkungan sehingga pemilihan teknologi dan pengelolaannya tidak hanya didasarkan pada keuntungan sesaat (jangka pendek). Kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) misalnya, dapat diperburuk dengan pengelolaan lahan yang hanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek konservasi. Teknologi ramah lingkungan yang sudah banyak dikembangkan dan telah digunakan, antara lain Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Pembangunan pertanian berkelanjutan memerlukan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) yang pada dasarnya menekankan pada penggunaan low external input. Ke depan, upaya yang perlu ditempuh antara lain adalah melalui penyuluhan dan sosialisasi GAP dan khusus

pada daerah lahan kering (kritis dan DAS) upaya-upaya konservasi baik melalui dana pemerintah maupun partisipasi masyarakat perlu dilakukan.

e. **Globalisasi Perdagangan dan Investasi**

Globalisasi perdagangan merupakan masalah sekaligus peluang dalam pembangunan pertanian. Beberapa implikasi dari dinamika lingkungan internasional tersebut, adalah: (1) setiap negara harus meningkatkan daya saing produknya agar tidak tersisih oleh produk-produk impor, di sisi lain kita dapat memanfaatkan pasar global yang semakin terbuka; dan (2) globalisasi di satu sisi akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dalam negeri dalam hal keragaman, mutu dan keamanan produk pangan. Di sisi lain, keragaman produk spesifik Indonesia (seperti tanaman hias, salak, manggis dan produk olahan) merupakan potensi untuk memasuki pasar internasional.

Untuk melindungi produk tertentu, dapat dilakukan melalui antara lain penerapan tarif dan pembatasan impor dengan mengindahkan aturan-aturan perdagangan internasional yang berlaku, termasuk upaya-upaya yang berkaitan dengan aspek perkarantina. Untuk meningkatkan ekspor, perlu dilakukan upaya-upaya aktif antara lain: (1) *joint promotion*, yang bertujuan untuk penetrasi dan perluasan pasar internasional; (2) pengembangan market intelligent untuk mencari peluang ekspor; dan (3) kerjasama perdagangan antar negara. Upaya lainnya yang tidak kalah penting adalah menarik investor asing dalam usaha pertanian dengan kebijakan yang memberikan insentif berusaha berupa antara lain, penyederhanaan dan kemudahan izin usaha serta jaminan keamanan berusaha.

f. **Terbangunnya Industri Hasil Pertanian Sampai Tingkat Desa**

Selama ini wilayah perdesaan lebih banyak berfungsi sebagai pemasok bahan baku bagi industri yang umumnya berada di daerah perkotaan (urban). Hal ini berarti bahwa petani belum dapat menikmati nilai tambah produknya secara optimum. Potensi pengembangan agroindustri di perdesaan sangat besar mengingat sentra-sentra produksi pertanian berada di perdesaan, tenaga kerja yang melimpah, dan potensi pasar yang besar. Selama ini potensi agroindustri dan minat berinvestasi di perdesaan terkendala oleh keterbatasan infrastruktur termasuk perbankan. Fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini terbatas pada pemberian alat-alat/sarana yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Diseminasi teknologi agroindustri telah sering dilakukan, namun belum tepat sasaran.

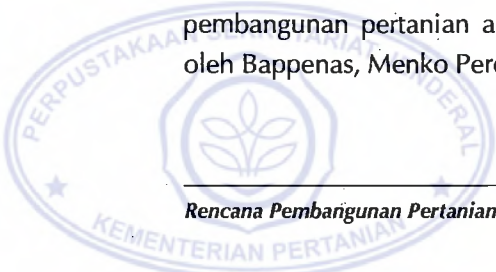
Ke depan, fokus kegiatan untuk meraih peluang pengembangan agroindustri di perdesaan antara lain adalah: (1) di tingkat Pusat dan Daerah perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelaraskan pembangunan infrastruktur; (2) mengajak investor melalui promosi dan fasilitasi kerjasama kemitraan; (3) meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan petani.

g. Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Sejalan Era Otonomi Daerah

Manajemen pembangunan pertanian di era otonomi daerah menuntut adanya keselarasan program antara Pusat dan Daerah. Kendala yang dihadapi saat ini adalah koordinasi antara Propinsi dan Kabupaten/Kota sangat lemah, terutama pada awal diberlakukannya otonomi daerah. Propinsi memiliki kewenangan dan dana namun tidak memiliki wilayah, sementara Kabupaten/Kota memiliki kewenangan tetapi dana terbatas. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menuntut adanya interrelasi dan interdependensi antara program/kegiatan Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. Implementasi kedua undang-undang ini adalah bahwa program pembangunan yang ditetapkan oleh Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota harus sinkron dan menjadi acuan bersama dalam pelaksanaannya.

Selama ini telah dibangun mekanisme perencanaan pembangunan pertanian secara berjenjang, dimana prioritas Propinsi disusun berdasarkan Musyawarah Pembangunan Pertanian Daerah yang mengacu pada prioritas Kabupaten/Kota di wilayahnya. Demikian pula Pusat memfasilitasi pertemuan regional guna menyelaraskan prioritas lintas propinsi dengan prioritas nasional. Pada awal pelaksanaan otonomi daerah hal ini tidak mudah dilakukan karena masih kentalnya euphoria otonomi. Di masa mendatang, upaya ini masih perlu terus dilaksanakan sejalan dengan penyempurnaan manajemen pembangunan pertanian.

Di tingkat Pusat, perlu ditingkatkan koordinasi di dalam dan antar departemen. Penguatan koordinasi di dalam departemen menuntut penjabaran tugas pokok dan fungsi yang lebih jelas di setiap unit kerja Eselon I disesuaikan dengan tuntutan dinamika pembangunan. Penguatan koordinasi antar departemen perlu dilakukan pengembangan jejaring kerja dengan memanfaatkan forum-forum koordinasi lintas sektoral dan sidang kabinet. Advokasi kepentingan pembangunan pertanian akan lebih efektif bila dikoordinasikan dengan baik oleh Bappenas, Menko Perekonomian dan Menko Kesejahteraan Rakyat.



h. ~~10.4~~ Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Good governance dicirikan, antara lain dengan keterbukaan, demokrasi, akuntabel, partisipatif dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kendala utama penyelenggaraan good governance adalah praktek KKN yang hingga kini masih menjadi masalah kronis. Upaya pengawasan internal dan eksternal telah banyak dilakukan namun belum efektif. Perlu disadari bahwa permasalahan KKN yang mendasar berada pada sistem penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem penganggaran, sistem penggajian, sistem rekrutmen dan penjurangan karir pegawai, sistem pengawasan dan pengendalian, serta moral individu aparat. Oleh sebab itu penghapusan KKN harus diawali dengan perubahan secara radikal pada setiap sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Tuntutan masyarakat terhadap good governance dan kuatnya komitmen pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu merupakan momentum yang sangat tepat untuk mewujudkan tujuan di atas. Departemen Pertanian sebagai pemegang mandat pembangunan pertanian saat ini terus mengupayakan birokrasi yang bersih, yang berarti bebas dari KKN, amanah, transparan dan akuntabel. Upaya pencegahan dilakukan antara lain melalui peningkatan mutu pengendalian dan pengawasan, pembinaan mental bagi pengawas dan aparat lainnya. Sangsi diterapkan secara tegas bagi aparat yang terbukti melanggar peraturan.



IV. RUH, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Ruh, Visi dan Misi

Sebelum merumuskan visi dan misi, perlu digariskan apa yang selayaknya menjadi ruh merupakan nilai (value) dan jiwa (spirit) yang melandasi pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan khususnya sektor pertanian tanpa dilandasi ruh yang menjadi dasar pijakan akan kehilangan arah dan semangat yang akhirnya dapat menyimpang dari tujuan dan sasaran pembangunan. Apalagi untuk sektor pertanian yang obyek pembangunannya adalah benda hidup, yakni manusia, hewan, tanaman dan lingkungannya (human activity system), maka ruh pembangunan sangat diperlukan, agar pembangunan tidak bersifat eksploitatif dan merusak kelestarian dari obyek pembangunan.

Seiring dengan semangat reformasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) oleh pemerintah yang bersih (clean government), maka selayaknya semangat reformasi ini dijadikan sebagai ruh di dalam pembangunan pertanian oleh Departemen Pertanian. Selain itu, semangat penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh suatu pemerintah yang bersih diharapkan dapat memperoleh hasil-hasil pembangunan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, ruh kepedulian harus menjadi nilai dan orientasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Tidak berlebihan jika Departemen Pertanian dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian Indonesia melandaskan pada nilai dan ruh yang Bersih dan Peduli.

Bersih berarti bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), amanah, transparan dan akuntabel. Peduli berarti memberikan fasilitasi, pelayanan, perlindungan, pembelaan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap kepentingan umum (masyarakat pertanian) di atas kepentingan pribadi dan golongan (demokratis) dan aspiratif.

Agenda dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009, telah menetapkan "Revitalisasi Pertanian" sebagai salah satu prioritas pembangunan bidang ekonomi. Revitalisasi Pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian besar rakyat dan meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi. Konsep tersebut merupakan komitmen politik yang harus didukung dan dijabarkan lebih lanjut operasionalnya oleh semua instansi yang terkait dengan pertanian.

Dalam tahun 2005-2025, pembangunan pertanian diarahkan untuk mencapai visi: terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, visi dan arah pembangunan pertanian jangka panjang, dan dinamika lingkungan strategis yang dibahas terdahulu, maka VISI Pembangunan Pertanian periode 2005-2009 adalah Terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani.

Pertanian tangguh adalah sosok pertanian yang mampu tumbuh berkelanjutan dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan, memperkuat intuisi, kebiasaan, atau tradisi; (2) kemajuan teknologi merupakan instrumen utama dalam pemanfaatan sumberdaya; (3) mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan jasa; (4) efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi sumberdaya; (5) mutu dan keunggulan merupakan orientasi, wacana, sekaligus tujuan; (6) profesionalisme merupakan karakter yang menonjol; dan (7) perekayasaan merupakan inti nilai tambah sehingga setiap produk yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai visi Pembangunan Pertanian tersebut, Departemen Pertanian mengemban MISI yang harus dilaksanakan adalah:

- (1) Mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi;
- (2) Mendorong pembangunan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan;
- (3) Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi;
- (4) Mendorong peningkatan peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional;
- (5) Meningkatkan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumberdaya dan pelayanan;
- (6) Memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan domestik dan global.

4.2. Tujuan

Tujuan pembangunan pertanian Indonesia tahun 2005-2009 adalah:

- (1) Membangun SDM aparatur profesional, petani mandiri dan kelembagaan pertanian yang kokoh;

- (2) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan;
- (3) Memantapkan ketahanan dan keamanan pangan;
- (4) Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian;
- (5) Menumbuhkembangkan usaha pertanian yang akan memacu aktivitas ekonomi perdesaan;
- (6) Membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.

4.3. Sasaran

Ada tiga kelompok sasaran utama pembangunan pertanian yang perlu dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu: (1) meningkatnya ketahanan pangan nasional yang meliputi meningkatnya kapasitas produksi komoditas pertanian dan berkurangnya ketergantungan terhadap pangan impor sekitar 5-10 persen dari produksi domestik; (2) meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian yang meliputi meningkatnya mutu produk primer pertanian, meningkatnya keragaman pengolahan produk pertanian dan meningkatnya ekspor serta meningkatnya surplus perdagangan komoditas pertanian; dan (3) meningkatnya kesejahteraan petani yang meliputi meningkatnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dan menurunnya insiden kemiskinan.

Ketiga sasaran tersebut merupakan bagian integral dari target sasaran pembangunan nasional. Berdasarkan target makro yang dimuat dalam RPJMN, periode 2005-2009 target PDB riil sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, kehutanan dan perikanan) dapat tumbuh rata-rata 3,52 persen per tahun dan dengan total penyerapan tenaga kerja sebesar 43,8 – 45,7 juta orang. Dari target makro tersebut dapat diturunkan indikator pembangunan pertanian secara kuantitatif sebagai berikut:

a. PDB, Investasi, dan Kesempatan Kerja

Selama periode 2005-2009 target pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam arti sempit (tidak termasuk kehutanan dan perikanan) meningkat dari 2,97 persen pada tahun 2005 menjadi 3,58 persen pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 3,29 persen per tahun. Target pertumbuhan tersebut di atas pertumbuhan tahun 2004 yang hanya mencapai sekitar 2 persen. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDB sektor pertanian akan meningkat dari Rp 198 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 226 triliun pada tahun 2009. Rincian menurut subsektor adalah sebagai berikut:

- (1) Pertumbuhan PDB subsektor tanaman pangan bervariasi antar tahun berkisar 0,43 – 1,08 persen atau rata-rata 0,89 persen per tahun.

Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDB subsektor tanaman pangan akan meningkat dari Rp 77 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp 79 trilyun pada tahun 2009.

- (2) Pertumbuhan PDB subsektor hortikultura meningkat dari 2,86 persen pada tahun 2005 menjadi 4,57 persen pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 3,38 persen per tahun. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDB sektor hortikultura akan meningkat dari Rp 46 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp 53 trilyun pada tahun 2009.
- (3) Pertumbuhan PDB subsektor perkebunan meningkat dari 6,01 persen pada tahun 2005 menjadi 6,49 persen pada tahun 2009 atau meningkat rata-rata 6,27 persen per tahun. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDB subsektor perkebunan akan meningkat dari Rp 48 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp 61 trilyun pada tahun 2009.
- (4) Pertumbuhan PDB subsektor peternakan meningkat dari 4,11 persen pada tahun 2005 menjadi 4,58 persen pada tahun 2009 atau meningkat rata-rata 4,37 persen per tahun. Berdasarkan harga riil 2000, PDB subsektor peternakan akan meningkat dari Rp 28 trilyun pada tahun 2005 menjadi Rp 33 trilyun pada tahun 2009.

Selama periode 2005-2009, dengan target PDB sektor pertanian seperti di atas, total investasi yang dibutuhkan sektor pertanian sebesar Rp 77,07 dengan rata-rata Rp 14,40 trilyun per tahun. Kebutuhan investasi menurut subsektor adalah subsektor tanaman pangan Rp 30,05 trilyun dengan rata-rata Rp 5,08 trilyun per tahun; hortikultura Rp 9,92 trilyun dengan rata-rata Rp 1,98 trilyun per tahun; perkebunan Rp 20,52 trilyun dengan rata-rata Rp 4,10 trilyun per tahun dan peternakan Rp 16,12 trilyun dengan rata-rata Rp 3,22 trilyun per tahun.

Selama periode 2005-2009, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian diproyeksikan meningkat dari 41,3 juta orang pada tahun 2005 menjadi 44,5 juta orang pada tahun 2009. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian pada tahun 2005 sedikit lebih besar dibanding tahun 2004 yang hanya mencapai 39 juta orang. Kesempatan kerja yang diciptakan sektor pertanian pada tahun 2009 sebesar 97,47 persen dari target kesempatan kerja sektor pertanian umum (pertanian, kehutanan dan perikanan) adalah 42,19 persen dari target kesempatan kerja nasional. Rincian menurut subsektor adalah sebagai berikut:

- (1) Penyerapan tenaga kerja subsektor tanaman pangan akan menurun dari 27,2 juta orang pada tahun 2005 menjadi 25,9 juta orang pada tahun 2009. Kesempatan kerja yang diciptakan subsektor tanaman pangan pada tahun 2009 sebesar 58,18 persen dari target kesempatan kerja sektor

pertanian atau 56,70 persen dari target kesempatan kerja sektor pertanian nasional.

- (2) Penyerapan tenaga kerja subsektor hortikultura akan meningkat dari 3,4 juta orang pada tahun 2005 menjadi 4,9 juta orang pada tahun 2009. Kesempatan kerja yang diciptakan subsektor hortikultura pada tahun 2009 sebesar 11,05 persen dari target kesempatan kerja sektor pertanian atau 10,77 persen dari target kesempatan kerja sektor pertanian nasional.
- (3) Penyerapan tenaga kerja subsektor perkebunan akan meningkat dari 6,3 juta orang pada tahun 2005 menjadi 7,9 juta orang pada tahun 2009. Kesempatan kerja yang diciptakan subsektor perkebunan pada tahun 2009 sebesar 17,74 persen dari target kesempatan kerja sektor pertanian atau 17,29 persen dari target kesempatan kerja sektor pertanian nasional.
- (4) Penyerapan tenaga kerja subsektor peternakan akan meningkat dari 4,3 juta orang pada tahun 2005 menjadi 5,8 juta orang pada tahun 2009. Kesempatan kerja yang diciptakan subsektor peternakan pada tahun 2009 sebesar 13,02 persen dari target kesempatan kerja sektor pertanian atau 12,69 persen dari target kesempatan kerja sektor pertanian nasional.

b. Ketahanan Pangan

Selama periode 2005-2009, pertumbuhan produksi tanaman pangan diproyeksikan mengalami peningkatan berkisar 0,35 – 6,50 persen per tahun. Secara rinci proyeksi produksi menurut komoditas adalah sebagai berikut:

- (1) Produksi padi akan meningkat dari 55,03 juta ton pada tahun 2005 menjadi 57,71 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 1,21 persen per tahun. Sementara itu, produksi jagung akan meningkat dari 11,82 juta ton pada tahun 2005 menjadi 13,97 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 4,23 persen per tahun.
- (2) Produksi kacang-kacangan, yaitu kedelai akan meningkat dari 777 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 1 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 6,50 persen per tahun. Sementara itu, kacang tanah akan meningkat dari 832 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 850 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 0,48 persen per tahun.
- (3) Produksi ubi-ubian, yaitu ubi kayu akan meningkat dari 19,57 juta ton pada tahun 2005 menjadi 19,90 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata akan meningkat 0,39 persen per tahun, sedangkan ubi jalar akan meningkat dari 1,88 juta ton pada tahun 2005 menjadi 1,91 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 0,35 persen per tahun.

Selama periode 2005-2009 pertumbuhan produksi tanaman hortikultura diproyeksikan mengalami peningkatan berkisar 2,94 – 8,41 persen per tahun. Secara rinci proyeksi produksi menurut komoditas adalah sebagai berikut:

- (1) Produksi sayuran, yaitu kentang akan meningkat dari 1,05 juta ton pada tahun 2005 menjadi 1,21 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 3,68 persen per tahun, sedangkan cabai akan meningkat dari 1,1 juta ton pada tahun 2005 menjadi 1,24 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 2,94 persen per tahun; bawang merah akan meningkat dari 819 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 1,1 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 7,65 persen per tahun; kubis akan meningkat dari 1,40 juta ton pada tahun 2005 menjadi 1,61 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 7,65 persen per tahun; tomat akan meningkat dari 730 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 873 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 4,64 persen per tahun; dan wortel akan meningkat dari 373 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 438 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 4,17 persen per tahun.
- (2) Produksi buah-buahan, yaitu pisang akan meningkat dari 4,53 juta ton pada tahun 2005 menjadi 6,07 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 7,43 persen per tahun, sedangkan mangga akan meningkat dari 1,68 juta ton pada tahun 2005 menjadi 2,23 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 7,35 persen per tahun; jeruk akan meningkat dari 1,62 juta ton pada tahun 2005 menjadi 1,84 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 3,37 persen per tahun; durian akan meningkat dari 824 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 1,15 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 8,41 persen per tahun; pepaya akan meningkat dari 665 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 848 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 6,12 persen per tahun; nenas akan meningkat dari 739 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 932 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 5,83 persen per tahun; dan alpukat akan meningkat dari 298 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 390 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 6,83 persen per tahun.

Selama periode 2005-2009 pertumbuhan produksi tanaman perkebunan diproyeksikan mengalami peningkatan berkisar 0,79 – 7,09 persen per tahun. Secara rinci proyeksi produksi menurut komoditas adalah sebagai berikut:

- (1) Produksi tanaman tahunan, yaitu kelapa sawit akan meningkat dari 13,15 juta ton pada tahun 2005 menjadi 16,74 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 6,21 persen per tahun, sedangkan karet akan meningkat

dari 1,95 juta ton pada tahun 2005 menjadi 2,34 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 4,79 persen per tahun; kakao akan meningkat dari 637 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 778 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 4,79 persen per tahun; kopi akan meningkat dari 753 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 892 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 5,30 persen per tahun; kelapa meningkat dari 3,29 juta ton pada tahun 2005 menjadi 3,39 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 0,79 persen per tahun; dan lada akan meningkat dari 101 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 130 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 6,48 persen per tahun.

- (2) Produksi tanaman semusim, yaitu tembakau akan meningkat dari 234 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 307 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 7,03 persen per tahun, sedangkan gula akan meningkat dari 2,16 juta ton pada tahun 2005 menjadi 2,85 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 7,09 persen per tahun.

Selama periode 2005-2009 pertumbuhan produksi peternakan diproyeksikan mengalami peningkatan berkisar 0,08–10,25 persen per tahun. Secara rinci proyeksi produksi menurut komoditas adalah sebagai berikut:

- (1) Produksi daging ruminansia besar, yaitu daging sapi akan meningkat dari 392 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 441 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 3,01 persen per tahun, sedangkan daging kerbau akan meningkat dari 46 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 47 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 0,68 persen per tahun; dan daging kuda akan meningkat dari 1.598 ton pada tahun 2005 menjadi 1.604 ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 0,08 persen per tahun.
- (2) Produksi daging ruminansia kecil, yaitu kambing akan meningkat dari 71 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 77 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 2,0 persen per tahun, sedangkan daging domba akan meningkat dari 87 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 98 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 3,02 persen per tahun; dan daging babi akan meningkat dari 191 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 209 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 2,40 persen per tahun.
- (3) Produksi daging unggas akan meningkat dari 1,52 juta ton pada tahun 2005 menjadi 2,01 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 7,61 persen per tahun, sedangkan produksi telur akan meningkat dari 1,14 juta ton pada tahun 2005 menjadi 1,60 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 8,74 persen per tahun.

- (4) Produksi susu akan meningkat dari 657 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 971 ribu ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 10,25 persen per tahun.

Selama periode 2005-2009 konsumsi bahan pangan utama (beras, jagung, kedelai dan gula) diproyeksikan mengalami peningkatan berkisar 1,21 – 3,57 persen per tahun. Secara rinci perkembangan konsumsi menurut komoditas adalah sebagai berikut:

- (1) Konsumsi beras akan meningkat dari 36,08 juta ton pada tahun 2005 menjadi 37,96 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 1,21 persen per tahun. Rata-rata peningkatan konsumsi tersebut sama dengan rata-rata peningkatan produksi. Neraca mengalami defisit yang cenderung meningkat selama 2005-2009 yaitu dari 313 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 445 ribu ton pada tahun 2009. Defisit tersebut sangat tipis, yaitu sekitar 0,73 – 1,17 persen atau rata-rata 0,89 persen dari konsumsi.
- (2) Konsumsi jagung akan meningkat dari 12,14 juta ton pada tahun 2005 menjadi 13,72 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 3,01 persen per tahun. Rata-rata peningkatan konsumsi tersebut lebih lambat dibanding dengan rata-rata peningkatan produksi sebesar 4,23 persen per tahun. Neraca mengalami defisit yang cenderung menurun yaitu dari 320 ribu ton pada tahun 2005 menjadi 14 ribu ton pada tahun 2007 dan setelah itu mengalami surplus yang meningkat dari 116 ribu ton pada tahun 2008 menjadi 254 ribu ton pada tahun 2009. Defisit dan surplus tersebut masih tipis yang masing-masing merupakan 0,11 – 2,64 persen dan 0,87 – 1,82 persen dari konsumsi.
- (3) Konsumsi kedelai akan meningkat dari 2,39 juta ton pada tahun 2005 menjadi 2,57 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 1,74 persen per tahun. Rata-rata peningkatan konsumsi tersebut lebih lambat dibanding dengan rata-rata peningkatan produksi 6,50 persen per tahun. Neraca mengalami defisit yang cenderung menurun selama 2005-2009 yaitu dari 1,61 juta ton pada tahun 2005 menjadi 1,57 juta ton pada tahun 2009. Defisit tersebut masih sangat besar yang merupakan 61,06–67,45 persen atau rata-rata 64,27 persen dari konsumsi.
- (4) Konsumsi gula akan meningkat dari 3,30 juta ton pada tahun 2005 menjadi 3,82 juta ton pada tahun 2009 atau rata-rata meningkat 3,57 persen per tahun. Rata-rata peningkatan konsumsi tersebut lebih lambat dibanding dengan rata-rata peningkatan produksi 7,09 persen per tahun. Neraca mengalami defisit yang cenderung menurun selama 2005-2009 yaitu dari 1,13 juta ton pada tahun 2005 menjadi 0,97 juta ton pada tahun 2009.

Defisit tersebut masih cukup besar yang merupakan 25,5–34,4 persen atau rata-rata 29,79 persen dari konsumsi.

Sasaran pembangunan pertanian 2005-2009 pada aspek diversifikasi konsumsi pangan perlu memperhatikan Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan dan menurunnya ketergantungan pada satu jenis pangan pokok tertentu. Sasaran PPH pada tahun 2009 adalah 96,6 persen dengan kontribusi padi-padian maksimal 51,6 persen, lemak dan minyak 10 persen, sedangkan kontribusi minimal untuk umbi-umbian adalah 5,7 persen, pangan hewani 11,2 persen, buah/biji berminyak 3 persen, kacang-kacangan 4,8 persen, gula 5 persen, sayur dan buah 5,7 persen dan sumber pangan lainnya 3 persen. Pencapaian sasaran PPH sebesar 100 persen akan dicapai pada tahun 2010 sesuai dengan sasaran Indonesia sehat 2010.

c. Nilai Tambah dan Daya saing

- (1) Selama periode 2005-2009 keragaman produk olahan komoditas pertanian diproyeksikan meningkat rata-rata 5 persen per tahun.
- (2) Selama periode 2005-2009 nilai ekspor komoditas pertanian juga diproyeksikan meningkat dengan laju 11,34 persen per tahun, lebih tinggi dibanding laju nilai impor yang hanya mencapai 3,91 persen per tahun. Dengan kondisi demikian, neraca perdagangan diproyeksikan meningkat dari US\$ 3,9 milyar pada tahun 2005 menjadi US\$ 7,7 milyar pada tahun 2009 atau meningkat rata-rata sebesar 17,11 persen per tahun. Total devisa bruto yang mampu disumbangkan sektor pertanian diproyeksikan meningkat dari US\$ 7,8 milyar pada tahun 2005 menjadi US\$ 12,3 milyar pada tahun 2009.
- (3) Selama periode 2005-2009 akan terjadi peningkatan efisiensi produksi yang dicerminkan oleh menurunnya biaya produksi per unit dengan laju 5 persen per tahun.

d. Kesejahteraan Petani

- (1) Selama periode 2005-2009, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian diperkirakan meningkat dari Rp 4,80 juta pada tahun 2005 menjadi Rp 5,08 juta per kapita per tahun atau rata-rata meningkat sebesar 1,40 persen per tahun.
- (2) Selama periode 2005-2009 persentase penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan dari 18,90 persen pada tahun 2005 menjadi 15,02 persen pada tahun 2009.

V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Landasan: Revitalisasi Pertanian

Strategi dan kebijakan pembangunan pertanian 2005-2009 disusun berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satu visi RPJMN yang menjadi landasan dalam penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan pertanian adalah: "terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan".

Secara makro, pertumbuhan ekonomi (PDB) selama periode tahun 2005-2009 ditargetkan tumbuh rata-rata sebesar 6,6 persen per tahun, sedangkan sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) diharapkan tumbuh rata-rata sebesar 3,5 persen per tahun. Dari target pertumbuhan tersebut maka sektor pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) ditargetkan bisa tumbuh rata-rata sebesar 3,3 persen per tahun.

Agenda pembangunan ekonomi dalam RPJMN yang terkait dengan pembangunan pertanian, antara lain: (1) revitalisasi pertanian, (2) peningkatan investasi dan ekspor non-migas; (3) pemantapan stabilisasi ekonomi makro; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) pembangunan perdesaan; dan (6) perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Revitalisasi pertanian antara lain diarahkan untuk meningkatkan: (1) kemampuan produksi beras dalam negeri sebesar 90-95 persen dari kebutuhan; (2) diversifikasi produksi dan konsumsi pangan; (3) ketersediaan pangan asal ternak; (4) nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan (5) produksi dan ekspor komoditas pertanian.

5.2. Strategi Umum

Strategi umum untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian adalah sebagai berikut:

- (1) **Melaksanakan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN.**

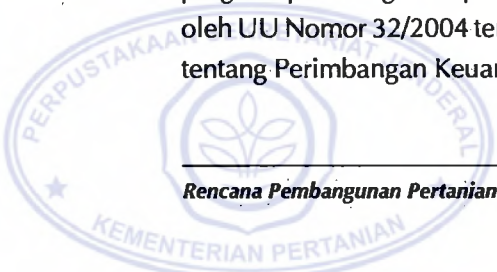
Reformasi pembangunan menuntut perlunya segera dilaksanakan rekonstruksi kelembagaan pemerintahan. Kebijakan pembangunan dirancang

dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, antara lain dalam bentuk debat publik, sosialisasi dan penyertaan masyarakat dalam pengawasan. Bersama dengan itu perlu dilakukan penataan berbagai sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain sistem penganggaran, sistem penggajian, sistem rekrutmen dan penjenjangan karir pegawai, sistem pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan mental individu aparat. Dalam operasionalisasinya diperlukan peningkatan moral dan profesionalisme aparat dalam mendukung manajemen pembangunan yang bersih, peduli, transparan dan kredibel. Manajemen pembangunan seperti itu diharapkan akan berdampak kepada pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal, memberikan insentif bagi investasi, berorientasi pada kepentingan masyarakat (demokratis) dan bebas dari praktek KKN.

(2) Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian

Sebagai bagian dari tulang punggung pembangunan ekonomi, pembangunan pertanian harus dilaksanakan secara sinergis dengan pembangunan sektor lainnya mengacu kepada RPJMN. Di sisi lain pelaksanaan pembangunan pertanian dilakukan oleh berbagai pelaku pembangunan antara lain Departemen Teknis terkait, Pemerintah Daerah, petani, swasta/dunia usaha, dan masyarakat, serta stakeholders lainnya. Dengan demikian untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, koordinasi adalah salah satu kunci keberhasilan karena kebijakan yang terkait dengan pembangunan pertanian tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Departemen Pertanian, melainkan sebagian besar berada di luar Departemen Pertanian.

Untuk meningkatkan koordinasi di tingkat pusat perlu dilakukan pengembangan jejaring kerja dengan memanfaatkan forum-forum koordinasi lintas sektoral dan sidang kabinet. Advokasi kepentingan pembangunan pertanian akan lebih efektif bila dikoordinasikan dengan baik oleh Bappenas, Menko Perekonomian dan Menko Kesejahteraan Rakyat. Di dalam lingkup Departemen Pertanian peningkatan koordinasi memerlukan penjabaran tugas pokok dan fungsi unit kerja secara lebih jelas dan tegas antara tugas pembinaan (steering), pengawasan dan pelaksanaan (rowing). Peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) dilakukan dengan memanfaatkan dan mengembangkan forum-forum perencanaan dan advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian sesuai dengan peta kewenangan yang diatur oleh UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.



(3) Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan.

Permasalahan mendasar yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan adalah konversi lahan yang menyebabkan penurunan luas baku lahan sawah pada khususnya, penurunan kualitas daerah aliran sungai hulu (DAS) sebagai akibat meningkatnya intensitas usahatani di daerah DAS, dan pertambahan penduduk yang memerlukan pemenuhan kebutuhan pangan sehingga meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian pangan. Salah satu dampak dari ekstensifikasi antara lain adalah penggundulan hutan dan eksploitasi sumberdaya lahan secara berlebihan. Di sisi lain, kekayaan dan keberagaman sumberdaya lahan dan hayati Indonesia, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan saling ketergantungan yang menguntungkan antar wilayah, dan memacu kegiatan perdagangan domestik dan global, mengembangkan investasi untuk menciptakan sumber pertumbuhan dan pendapatan baru dengan menempatkan petani sebagai pelaku utamanya. Untuk itu perlu: (1) perluasan dan pemanfaatan basis produksi secara berkelanjutan melalui konsolidasi, (2) optimalisasi pemanfaatan lahan, (3) pembukaan lahan baru terutama di luar Jawa, dan (4) pelestarian dan konservasi sumberdaya lahan dan hayati.

(4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM pertanian

Dengan pemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,5 hektar dan infrastruktur pertanian yang kurang memadai, organisasi petani dan kualitas sumberdaya manusia yang lemah, tanpa adanya kelembagaan yang kuat dan manajemen pengelolaan lahan yang memungkinkan tercapainya skala usaha yang optimal, akan mengakibatkan usahatani menjadi kurang menarik secara ekonomis, karena tidak dapat memberikan jaminan sebagai sumber pendapatan yang mampu memberikan penghidupan yang layak. Upaya peningkatan kesejahteraan petani kecil hanya dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM pertanian dan kemandirian petani, serta pengembangan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan akses petani kepada aset produktif di wilayah perdesaan.

(5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

Kondisi sarana dan prasarana pertanian sampai saat ini belum berpihak kepada petani sehingga mereka memiliki posisi tawar yang lemah. Sarana dan prasarana pertanian seperti sarana pengairan dan drainase, jalan, listrik, jalan usahatani, pelabuhan (khususnya pelabuhan-pelabuhan ekspor baru di

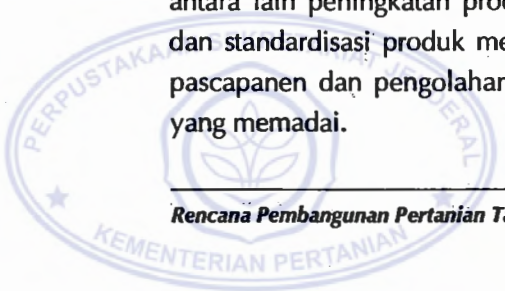
wilayah timur Indonesia), transportasi dan telekomunikasi merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan pertanian. Penerapan inovasi teknologi sering terhambat karena tidak tersedianya sarana dan prasarana seperti penyediaan input produksi, jaringan informasi atau infrastruktur pemasaran hasil. Untuk itu pengembangan sarana dan prasarana dilakukan melalui: (1) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana termasuk sarana pemasaran yang dibutuhkan oleh banyak pelaku pembangunan pertanian, (2) merangsang investor untuk melakukan investasi usaha di bidang pertanian, dan (3) melakukan advokasi kepada instansi/lembaga lain untuk berpartisipasi dalam membangun sarana dan prasarana pertanian.

(6) Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna

Sejalan dengan pergeseran sistem dan manajemen produksi di masa yang akan datang dan menyikapi perkembangan permintaan pasar yang menyangkut mutu, harga, dan pelayanan, memerlukan perubahan strategi dalam menghasilkan inovasi teknologi, dengan memperhatikan keragaman pengguna, dan ekosistem pengembangannya. Dari sisi diseminasi, perlu perubahan strategi dalam mengidentifikasi dan melakukan karakterisasi pengguna dan pelaku penyebaran inovasi pertanian. Rendahnya produktivitas dan kualitas produk pertanian Indonesia merupakan akibat langsung dari rendahnya tingkat inovasi teknologi yang diterapkan petani. Untuk itu perlu penajaman program penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu perlu reorientasi sistem diseminasi dan revitalisasi penyuluhan pertanian.

(7) Mempromosikan dan memproteksi komoditas pertanian

Komitmen Indonesia untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan yang dapat menimbulkan distorsi pasar ternyata tidak dilaksanakan oleh semua negara, sehingga petani Indonesia dihadapkan pada persaingan yang tidak adil dengan petani dari negara lain yang dengan mudah mendapat perlindungan tarif dan non-tarif serta subsidi langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, ke depan pemerintah masih harus menerapkan pengendalian harga sekaligus mempromosikan produk-produk pertanian strategis. Proteksi dapat dilakukan antara lain melalui kebijakan penetapan tarif dan pengaturan impor, penetapan harga dasar, memberikan subsidi secara tepat untuk sarana produksi, dan subsidi bunga kredit untuk modal usahatani. Promosi dapat dilakukan melalui antara lain peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, perbaikan kualitas dan standardisasi produk melalui penerapan teknologi produksi, pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil, serta menyediakan infrastruktur pertanian yang memadai.



5.3. Arah Kebijakan

Banyak kebijakan dan strategis yang terkait langsung dengan pembangunan pertanian, namun kewenangannya berada di berbagai instansi lain. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan makro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan pengembangan industri, kebijakan perdagangan, pemasaran, dan kerjasama internasional, kebijakan pengembangan infrastruktur khususnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan, kebijakan pengembangan kelembagaan (termasuk di dalamnya lembaga keuangan, fungsi penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM, dan pengembangan organisasi petani), kebijakan pendayagunaan dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan, kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan baru, dan kebijakan pengembangan ketahanan pangan. Matriks dukungan kebijakan dari instansi terkait bagi pembangunan pertanian secara lebih terinci disajikan dalam Lampiran 1. Namun demikian, ada beberapa kebijakan strategis yang perlu ditekankan dan memerlukan penanganan segera yaitu:

- (1) Kebijakan ekonomi makro yang kondusif yaitu inflasi yang rendah, nilai tukar yang stabil dan suku bunga riil positif.
- (2) Pembangunan infrastruktur pertanian meliputi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, perluasan lahan pertanian terutama di luar Jawa, pencegahan konversi lahan terutama di Jawa, pengembangan jalan usahatani dan jalan produksi serta infrastruktur lainnya.
- (3) Kebijakan pembiayaan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang khusus melayani sektor pertanian, lembaga keuangan mikro, pembiayaan pola syariaah, dan lainnya.
- (4) Kebijakan perdagangan yang memfasilitasi kelancaran pemasaran baik di pasar dalam negeri maupun ekspor. Selain itu, untuk melindungi sektor pertanian dari persaingan di pasar dunia, diperlukan: (a) memperjuangkan konsep Strategic Product (SP) dalam forum WTO; (b) penerapan tarif dan hambatan non-tarif untuk komoditas-komoditas beras, kedelai, jagung, gula, beberapa produk hortikultura dan peternakan.
- (5) Kebijakan pengembangan industri yang lebih menekankan pada agroindustri skala kecil di perdesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.
- (6) Kebijakan investasi yang kondusif untuk lebih mendorong minat investor dalam sektor pertanian.
- (7) Pembiayaan pembangunan yang lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor pertanian dan sektor-sektor pendukungnya.
- (8) Perhatian pemerintah daerah pada pembangunan pertanian meliputi:

infrastruktur pertanian, pemberdayaan penyuluh pertanian, pengembangan instansi lingkup pertanian, menghilangkan berbagai pungutan yang mengurangi daya saing pertanian, serta alokasi APBD yang memadai.

Beberapa kebijakan yang langsung terkait dengan sektor pertanian dan dalam kewenangan atau memerlukan masukan dari Departemen Pertanian adalah:

- (1) Kebijakan dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang bersih, transparan, dan bebas KKN, disertai penerapan *reward and punishment* secara konsisten.
- (2) Kebijakan dalam peningkatan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian, diarahkan untuk: (1) peningkatan keterbukaan dalam perumusan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian, (2) peningkatan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian manajemen pembangunan pertanian, (3) penyelarasan pembangunan pertanian antar sektor dan wilayah.
- (3) Kebijakan dalam memperluas dan meningkatkan basis produksi secara berkelanjutan diarahkan untuk: (1) peningkatan investasi swasta, (2) penataan hak, kepemilikan dan penggunaan lahan, (4) kebijakan pewilayahan komoditas, dan (5) penataan sistem pewarisan lahan pertanian.
- (4) Kebijakan dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian diarahkan untuk: (1) menyusun kebijakan revitalisasi penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan pertanian, (2) peningkatan peran serta masyarakat, (3) peningkatan kompetensi dan moral aparatur pertanian, (4) penyelenggaraan pendidikan pertanian bagi petani, dan (5) pengembangan kelembagaan petani.
- (5) Kebijakan dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian diarahkan untuk: (1) pengembangan sarana dan prasarana usaha pertanian, (2) pengembangan lembaga keuangan perdesaan, (3) pengembangan sarana pengolahan dan pemasaran.
- (6) Kebijakan dalam meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna diarahkan untuk: (1) merespon permasalahan dan kebutuhan pengguna, (2) mendukung optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian spesifik lokasi, (3) pengembangan produk berdayasaing, (4) penyelarasan dan integrasi dengan penguasaan IPTEK pertanian, dan (5) percepatan proses dan perluasan jaringan diseminasi dan penjangkaran umpan balik inovasi pertanian.

- (7) Kebijakan dalam meningkatkan promosi dan proteksi komoditas pertanian, diarahkan untuk: (1) menyusun kebijakan subsidi tepat sasaran dalam sarana produksi, harga output, dan bunga kredit untuk modal usahatani (2) peningkatan ekspor dan pengendalian impor, (3) kebijakan penetapan tarif impor dan pengaturan impor, (4) peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, (5) perbaikan kualitas dan standardisasi produk melalui penerapan teknologi produksi, pengelolaan pascapanen dan pengolahan hasil, dan (5) penguatan sistem pemasaran dan perlindungan usaha .

Strategi dan kebijakan yang lebih spesifik untuk mencapai setiap tujuan pembangunan pertanian diuraikan pada Lampiran 2. Selain itu, kebijakan khusus berkaitan dengan perberasan, pemanfaatan perluasan lahan pertanian dan kebijakan pembiayaan pertanian disajikan dalam Box 1-3.



Kebijakan Perberasan

Beras merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar (95%) penduduk Indonesia dan berperan penting dalam perekonomian nasional, sebagai penyedia lapangan usaha dan lapangan kerja sebagian besar masyarakat, pendapatan nasional, stabilitas ekonomi, sosial dan keamanan masyarakat.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2003, dari 25,58 juta rumahtangga-tani, terdapat 18,12 juta rumahtangga (70,84%) yang mengusahakan padi, belum termasuk rumahtangga yang bergerak di bidang usaha jasa terkait dengan industri perberasan, atau 34,47 persen dari total keluarga nasional (52,56 juta rumahtangga). Usahatani padi juga memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi lebih dari 21 juta rumahtangga dan menyumbang pendapatan rumah tangga petani padi antara 25-35 persen, serta menyumbang sekitar 66 persen terhadap PDB pangan.

Bagi Indonesia, dengan jumlah penduduk yang banyak (+ 220 juta saat ini) dan tersebar di wilayah kepulauan, memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap ketersediaan pangan pokok beras. Untuk memenuhi kebutuhan akan beras yang terus berkembang seiring dengan peningkatan jumlah dan kesejahteraan penduduk, maka pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri tetap menjadi prioritas pembangunan pertanian.

Pengembangan komoditas beras dihadapkan pada permasalahan dan tantangan: (a) penerapan teknologi yang masih terbatas pada aspek budidaya; (b) meningkatnya alih fungsi lahan produktif; (c) menurunnya jumlah dan kualitas sumberdaya lahan dan air; (d) menurunnya tingkat kesuburan lahan dan kualitas air akibat degradasi kualitas lingkungan; (e) fenomena iklim dan gangguan OPT yang belum terkendalikan secara optimal; (f) penurunan insentif usahatani; dan (g) persaingan tidak adil dengan produk impor.

Oleh karena itu, kebijakan pengembangan komoditas beras diarahkan untuk: (1) Membangun dan mengembangkan kawasan agribisnis padi yang modern, tangguh dan mampu memberikan jaminan perbaikan kehidupan petani; (2) Meningkatkan efisiensi usahatani melalui inovasi teknologi unggul dan berdayasaing; (3) Mengelola pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, efisien dan produktif serta berkelanjutan; (4) Memberdayakan petani serta masyarakat perdesaan; dan (5) Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan yang tangguh, efisien dan produktif.

Sedangkan program yang dilakukan meliputi: (a) Pengembangan sarana-prasarana; (b) Akselerasi peningkatan produktivitas; (c) Perluasan Areal Tanam; (d) Pengembangan sistem perbenihan; (e) Pengembangan sistem perlindungan tanaman; (f) Pengolahan dan pemasaran hasil; dan (g) Pengembangan kelembagaan. Kebijakan perberasan saat ini meliputi: (a) penetapan HDPP; (b) penerapan tarif impor dan larangan impor pada saat panen raya; (c) subsidi benih dan pupuk; (d) pengembangan teknologi; dan (e) penyediaan infrastruktur.

Pemanfaatan dan Perluasan Lahan Pertanian

Ketersediaan lahan pertanian di Indonesia relatif terbatas. Rata-rata luas lahan per kapita hanya mencapai 0,09 ha, dan sekitar 53 persen dari rumahtangga tani menguasai lahan kurang dari 0,5 ha. Data PATANAS di Jawa menunjukkan gambaran yang lebih asing lagi, dimana sekitar 88 persen rumahtangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 ha. Data Sensus Pertanian, jumlah petani gurem (lahan garapan < 0,5 Ha) meningkat dari 10,8 juta KK tahun 1993 menjadi 13,7 juta KK tahun 2003 (2,6 %/tahun).

Fenomena di atas merupakan dampak dari: (a) masih tingginya pertumbuhan penduduk yang mencapai sekitar 1,3 persen per tahun; (b) konversi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian. Konversi lahan di Jawa pada tahun 1999-2002 mencapai rata-rata 110 ribu ha/tahun.

Untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian secara nasional dan meningkatkan skala usaha per rumahtangga, diperlukan kebijakan untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan memperluas ketersediaan luas baku lahan. Menurut data BPS (2002), dari sekitar 188 juta ha wilayah daratan Indonesia, 64 juta ha diantaranya sudah dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Lahan yang potensial digunakan, tanpa mengganggu keseimbangan ekologis mencapai 32 juta ha yang tersebar di propinsi Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan semua propinsi di pulau Kalimantan, Papua dan Maluku. Sementara itu ada sekitar 9,7 juta ha lahan terlantar yang saat ini ditumbuhi alang-alang dan semak belukar. Lahan tersebut memiliki potensi untuk direhabilitasi dan dimanfaatkan untuk pertanian.

Pemanfaatan dan perluasan lahan tersebut perlu dikaitkan dengan upaya mendorong tumbuhnya unit-unit usaha pertanian komersial yang berorientasi bisnis. Dengan demikian kebijakan dan program yang dilakukan meliputi: (a) pemanfaatan lahan terlantar; (b) perluasan lahan sawah di luar Jawa dengan potensi sekitar 16 juta ha, terutama di Papua, Kalimantan dan Sumatera; (c) perluasan lahan kering, dengan potensi sekitar 25 juta ha dan dapat digunakan untuk tanaman perkebunan dan buah-buahan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua.



Kebijakan Pembiayaan Pertanian

Investasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan diterjemahkan sebagai pengalokasian anggaran (APBN dan APBD) yang diarahkan untuk menstimulasi dana masyarakat. Untuk itu, porsi terbesar pembiayaan pembangunan berada di tangan pelaku pembangunan pertanian, yaitu para pengusaha, termasuk petani.

Untuk mendorong pembangunan usaha pertanian, diperlukan berbagai kebijakan berkaitan dengan ketersediaan sumber pembiayaan dari kredit program, kredit komersial dan sumber pembiayaan non-perbankan agar dapat diakses oleh pelaku pembangunan pertanian. Kebijakan dimaksud antara lain: (a) Kebijakan subsidi Suku Bunga Kredit Ketahanan Pangan, (b) Kebijakan Skim Kredit Agribisnis (SKA), (c) Kebijakan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif (KIK), (4) Kebijakan Mengenai Kredit Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), dan (5) Kebijakan Lembaga Keuangan Mikro. Untuk meningkatkan akses pelaku pembangunan pertanian, ke depan perlu dipikirkan kemungkinan pengembangan kelembagaan Bank Pertanian.

Disamping pola-pola di atas, mulai tahun 2005 Departemen Pertanian mengembangkan pola pembiayaan bagi usaha kecil pertanian melalui Skim Penjaminan pola Syariah. Dana penjaminan dititipkan di bank syariah atas nama lembaga penjamin untuk digunakan sebagai jaminan bagi usaha kecil pertanian mendapatkan kredit. Usaha kecil pertanian yang dapat memanfaatkan dana penjaminan ini adalah usaha tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan hortikultura yang komposisinya tergantung pada prospek usahanya.

Program penjaminan akan dimulai tahun 2005, dengan sasaran dapat menjamin kredit bagi 1.000 usaha kecil pertanian dan sekitar 500 lembaga keuangan mikro syariah yang berada di sentra produksi pertanian yang diharapkan dapat membiayai sekitar 10.000 usaha mikro pertanian. Dana penjaminan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mengucurkan kredit 8-10 kali dari dana penjaminan. Skim ini akan didukung dengan peta potensi usaha sektor pertanian dan pola pendampingan untuk para usahawan mikro dan usaha kecil di bidang pertanian. Untuk tahun 2005, jumlah tenaga pendamping yang diperlukan sebanyak 1.400 orang. Sebanyak 400 tenaga pendamping diperlukan untuk 1.000 usaha kecil, dengan asumsi seorang pendamping melayani 2-3 usaha kecil.

Skim syariah yang akan digunakan adalah: (1) pola bagi hasil (mudharabah) antara petani sebagai nasabah (mudharib) dengan bank syariah sebagai penyedia dana (shahibul maal) untuk membiayai usaha petani, (2) pola perkongsian (musyarokah), yaitu pola bagi hasil antara lembaga keuangan dan nasabah yang masing-masing memberikan kontribusi modal, dan (3) pola sewa beli (ijarah), yaitu pola pembiayaan dimana lembaga keuangan menyewakan barang atau sarana kepada nasabah dan nasabah diwajibkan membayar sewa.



VI. PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha pertanian sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama petani.

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi pembangunan pertanian, maka Program Pembangunan Pertanian Tahun 2005-2009, dirumuskan dalam tiga program, yaitu; (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Pengembangan Agribisnis; dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

6.1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah diperoleh rumah tangga, aman dikonsumsi dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan mencakup komponen: (1) ketersediaan pangan, (2) distribusi dan konsumsi pangan, (3) penerimaan oleh masyarakat, (4) diversifikasi pangan, dan (5) keamanan pangan.

Program peningkatan ketahanan pangan merupakan fasilitasi bagi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Ketahanan pangan rumah tangga berkaitan dengan kemampuan rumah tangga untuk dapat akses terhadap pangan di pasar. Dengan demikian ketahanan pangan rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan daya beli rumah tangga. Sejalan dengan itu maka peningkatan pendapatan rumah tangga merupakan faktor kunci dari peningkatan ketahanan pangan rumah tangga. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan.

Tujuan program ketahanan pangan adalah untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal, (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan. Khusus untuk beras, BAPPENAS menetapkan sasaran pemenuhan

konsumsi beras dari produksi dalam negeri sebesar 90-95 persen. Selain itu diharapkan pula ada peningkatan dalam konsumsi pangan yang berasal dari produk ternak (daging, telur, susu).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, Program Peningkatan Ketahanan Pangan dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa subprogram, yaitu: (1) Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan, (2) Pengembangan Diversifikasi Produksi dan Konsumsi Pangan, (3) Penerapan Standar Kualitas dan Keamanan Pangan, (4) Penurunan Tingkat Kerawanan Pangan, (5) Pengembangan dan Diseminasi Inovasi Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan, dan (6) Pengembangan Manajemen Pembangunan Ketahanan Pangan.

Rencana tindak program peningkatan ketahanan pangan, antara lain: (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi produksi komoditas pangan pokok, (2) Pengembangan sumber pangan alternatif lokal, (3) Pengembangan pola konsumsi pangan lokal non-beras (4) Pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi, (5) Pengembangan jaringan usahatani, (6) Fasilitasi sistem penyediaan sarana produksi, (7) Pengembangan jaringan permodalan, (8) Pengembangan perbenihan, (9) Fasilitasi subsidi input produksi, (10) Pengembangan jasa aslin pertanian, (11) Perumusan dan penetapan kebijakan harga pangan, (12) Pengelolaan tata niaga pangan, (13) Pengamanan produksi pertanian dan perkarantinaan, (14) Penyusunan dan penerapan standar kualitas dan keamanan pangan, (15) Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, (16) Penguatan lembaga ketahanan pangan masyarakat, (17) Pengembangan teknologi pengurangan kehilangan hasil, (18) Pengembangan teknologi sumberdaya alam, (19) Pengembangan teknologi pengolahan pangan tradisional, (20) Pengembangan teknologi perbaikan mutu dan keamanan pangan, dan (21) Penyelarasan kebijakan dan program peningkatan ketahanan pangan.

6.2. Program Pengembangan Agribisnis

Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, maka arah yang perlu ditempuh adalah memperluas cakupan kegiatan ekonomi produktif petani serta peningkatan efisiensi dan daya saing. Perluasan kegiatan ekonomi yang memungkinkan dilakukan adalah: (1) peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan perbaikan kualitas; dan (2) mendorong kegiatan usahatani secara terpadu mencakup beberapa komoditas (sistem integrasi tanaman-ternak atau sistem integrasi tanaman-ternak-ikan).

Peningkatan efisiensi dan daya saing dilakukan dengan pendekatan agribisnis yang mencakup agribisnis hulu, kegiatan usahatani, agribisnis

hilir dan jasa penunjang. Berdasarkan komoditas, pengembangan agribisnis mencakup komoditas-komoditas unggulan lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan. Walaupun komoditas yang perlu dikembangkan akan bervariasi antar daerah sesuai potensinya, namun secara nasional prioritas pengembangan difokuskan pada 31 komoditas seperti pada Lampiran 3. Komoditas-komoditas tersebut memiliki kontribusi dan potensi yang cukup besar dilihat dari aspek pemenuhan ketahanan pangan, penyediaan bahan baku industri, peningkatan ekspor atau substitusi impor maupun perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi: (1) berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional, dan (2) meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB.

Sasaran dari program ini adalah: (1) berkembangnya usaha di sektor hulu, usahatani (on-farm), hilir (agroindustri) dan usaha jasa penunjang; (2) meningkatnya pertumbuhan PDB sektor pertanian; dan (3) meningkatnya ekspor produk pertanian segar dan olahan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, Program Pengembangan Agribisnis dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa subprogram, yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Kualitas Produk Pertanian dan Efisiensi Usaha, (2) Pengembangan Agroindustri Perdesaan, (3) Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian, (4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, (5) Pengembangan dan Diseminasi Inovasi Pertanian untuk Mendorong Pengembangan Agribisnis, (6) Pengembangan Manajemen Pembangunan Agribisnis, dan (7) Sub Program Khusus Pengembangan Pertanian Komersial.

Rencana tindak program pengembangan agribisnis, antara lain: (1) Penyusunan peta wilayah komoditas, (2) Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan, (3) Penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, (4) Pengkajian aspek sosial ekonomi dan kebijakan komoditas pertanian komersial, (5) Pengembangan varietas/jenis ternak unggul, (6) Pengembangan teknologi perbaikan sistem produksi komoditas pertanian, (7) Pengembangan teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan, (8) Pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi, (9) Pemanfaatan bioteknologi untuk perbaikan tanaman dan ternak, (10) Penerapan teknologi pasca panen, (11) Pengembangan agroindustri di kawasan sentra produksi, (12) Pengembangan

komoditas komersial, (13) Pengembangan kelembagaan dan informasi pasar, (14) Bimbingan teknis sistem produksi pertanian (Good Agriculture Practices/GAP), (15) Pengamanan produksi pertanian dan perkarantinaaan, (16) Penyesuaian kebijakan tarif impor dan subsidi ekspor, (17) Pengembangan kerjasama dan perdagangan internasional, (18) Sosialisasi dan penerapan peraturan perkarantinaaan dan SPS (sanitary and phyto-sanitary), (19) Pengembangan lembaga sistem jaminan mutu, (20) Pengembangan pola kemitraan usaha di bidang pertanian, (21) Pengembangan pola contract farming, (22) Pengembangan promosi produk pertanian, (23) Pengembangan infrastruktur perdesaan, dan (24) Penyelarasan kebijakan dan program pengembangan agribisnis.

6.3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan meliputi dimensi yang luas, namun untuk lebih menyederhanakan persoalan, definisi kesejahteraan dalam dokumen ini dibatasi pada kesejahteraan ekonomi atau lebih spesifik lagi pendapatan rumah tangga. Segala upaya yang dilakukan dalam pembangunan pertanian selayaknya didorong untuk mewujudkan kesejahteraan petani; disamping tujuan-tujuan lainnya.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, (2) semakin kokohnya kelembagaan petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif; dan (4) meningkatnya pendapatan petani.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa subprogram, yaitu: (1) Pemberdayaan Petani, (2) Pengembangan SDM Aparatur, (3) Pengembangan Kelembagaan, (4) Peningkatan Akses Petani terhadap Sumberdaya Produktif, (5) Perlindungan Petani dan Pertanian, (6) Pengembangan diversifikasi usaha rumahtangga, (7) Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Pertanian, (8) Upaya Khusus Penanggulangan Kemiskinan, dan (9) Pengembangan Manajemen Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Rencana tindak program peningkatan kesejahteraan petani antara lain: (1) Penyuluhan, pelatihan dan pendampingan petani, (2) Peningkatan kewirausahaan petani melalui penyetaraan pendidikan, (3) Pendidikan tingkat menengah untuk generasi muda tani, (4) Penguatan kelembagaan penyuluhan dan

pertanian lain di perdesaan, (5) Pengembangan diversifikasi usaha rumahtangga berbasis pertanian, (6) Advokasi penataan hak pemilikan, sertifikasi dan pencegahan konversi lahan, (7) Perumusan kebijakan penataan, pemanfaatan dan pajak progresif lahan, (8) Pemberian insentif usaha dan promosi investasi, (9) Pengembangan tata guna air dan konservasi lahan, (10) Fasilitasi investasi dan kemitraan usaha, (11) Perlindungan usaha pertanian, (12) Perumusan dan advokasi kebijakan perlindungan petani, (13) Pengkajian teknologi spesifik lokasi, (14) Pengembangan model kelembagaan usahatani berbasis inovasi pertanian (15) Peningkatan infrastruktur perdesaan, (16) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, (17) Penyelasaran kebijakan dan program dalam peningkatan kesejahteraan petani, dan (18) Koordinasi kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.

VII. MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERTANIAN

7.1. Kewenangan Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian

Untuk lebih mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Pertanian 2005-2009, maka setiap unit kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Selanjutnya dari Renstra masing-masing disusun Rencana Kerja Tahunan yang lebih operasional.

Manajemen pembangunan pertanian mengacu pada peta kewenangan sesuai otonomi daerah. Pada periode 2000-2004, manajemen pembangunan pertanian mengacu UU Nomor: 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 25 tahun 2000. Dalam perjalannya, UU Nomor: 22 Tahun 1999 dinilai tidak sesuai dengan perkembangan tuntutan pembangunan dan diganti dengan UU Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor: 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Manajemen pembangunan pertanian merupakan tugas dan kewenangan pemerintah pusat, propinsi dan daerah. Penjabaran program pembangunan pertanian dirumuskan sesuai dengan kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah dengan memperhatikan program-program sektor lainnya yang dapat mendorong pembangunan sektor pertanian. Penjabaran program juga mempertimbangkan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan kebijakan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan pembangunan pertanian yang wajib dilaksanakan dan tidak dapat dilimpahkan kepada propinsi. Kewenangan pemerintah propinsi mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta bidang pemerintahan tertentu lainnya dan dapat melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

7.2. Mekanisme Perencanaan

Mekanisme perencanaan pembangunan pertanian mengacu pada UU Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.214/M.PPN/11/2004 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 yang dikeluarkan Bappenas. Pemerintah Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Bappeda melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian sebagai bahan untuk diusulkan ke tingkat propinsi. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian juga dilakukan di tingkat Propinsi sebagai media koordinasi dan evaluasi atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bappeda Propinsi berperan mengkoordinasikan pembangunan pertanian terutama dalam memadukan kegiatan, pengembangan wilayah, dan sumber pembiayaan pembangunan.

Pemerintah Pusat melakukan pertemuan regional perencanaan pembangunan pertanian guna mensosialisasikan kebijakan nasional dan membangun komitmen Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat memfasilitasi rencana pembangunan pertanian daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional berdasarkan pertimbangan kesesuaian rencana daerah dengan (1) tata ruang pengembangan ekonomi dan penggunaan sumberdaya alam, aspek lingkungan dan peningkatan kapasitas, (2) pencapaian daya saing nasional atas dasar keunggulan komparatif wilayah dan komoditas, potensi sumberdaya, pusat-pusat pertumbuhan, potensi pasar, potensi komoditas secara nasional, (3) pemberdayaan wilayah tertinggal, pengentasan kemiskinan dan pemerataan, dan (4) kebijakan nasional, ketahanan pangan, kebijakan perdagangan internasional, kebijakan makro, dan pembangunan prasarana dan sarana dalam lingkup nasional.

Di tingkat Pusat kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan pertanian dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian (c/ Biro Perencanaan dan Keuangan).

7.3. Pelaksanaan

Pada hakekatnya, kegiatan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi sebesar-besarnya partisipasi masyarakat dengan mendayagunakan keterpaduan kegiatan yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta dan sumber-sumber dana pembangunan

pertanian lainnya. Pada pelaksanaannya pembangunan pertanian sebagian besar dilaksanakan di daerah dan tidak hanya terpaku pada batas-batas administrasi pemerintahan (kabupaten, propinsi), tetapi lebih bersifat lintas disiplin dan lintas sektoral. Untuk itu diperlukan adanya sinkronisasi kegiatan pembangunan pertanian dari kepentingan setiap komponen yang terlibat, baik di pusat maupun daerah. Komitmen Pemerintah Daerah dalam alokasi APBD dan keseriusan dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan-kegiatan di daerahnya sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian.

7.4. Monitoring, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian

Pemerintah mempunyai kewenangan menyusun standar dan prosedur monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi fasilitasi pembangunan pertanian. Monitoring dan evaluasi wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Daerah (Kabupaten/Kota). Monitoring ditujukan untuk memantau proses pelaksanaan dan kemajuan yang telah dicapai dari setiap kegiatan pembangunan pertanian. Evaluasi dilaksanakan sebagai upaya pengawasan, penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan secara efektif dan efisien.



VIII. PENUTUP

Pembangunan pertanian dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan, daya saing, dan peningkatan pendapatan/kesejahteraan petani. Kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat, sedangkan pemerintah berperan dalam memfasilitasi, mendorong dan memberdayakan kemampuan dan kreatifitas masyarakat.

Mengacu kepada visi, strategi dan kebijakan pembangunan pertanian, maka program pembangunan pertanian tahun 2005-2009 mencakup (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Pengembangan Agribisnis; dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan ditujukan dalam rangka dicapainya ketersediaan pangan yang cukup dan beragam pada tingkat nasional, regional dan rumah tangga, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan; Program Pengembangan Agribisnis dimaksudkan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Sedangkan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan petani, pengembangan kelembagaan dan peningkatan akses petani, terhadap sumber daya usaha pertanian.

Program pembangunan pertanian dirancang dan disesuaikan dengan dinamika permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya keberhasilan pembangunan pertanian akan sangat tergantung dari komitmen dan partisipasi seluruh stakeholders.



Lampiran 1: Matriks Keterkaitan Dukungan Kelembagaan Dalam Pembangunan Pertanian

No	Kebijakan	Instansi																		
		Menko Perekonomian	Menko Kesra	BI	Deptan, Dephut, Kelautan /Kan	KLH/ BPN	Dep-kes, BSN	Karantina	Kem-Ristek/ BPPT /LPI	Dep. Per-dag	Dep-Perin	Dep PU	Dep Hukum & Ham	Dep. Hub	Dep. Keu	Kem. Kop & UKM	Bulog	Pemda /Dep. Dagri	Deplu	Ormas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Makro																			
	- Kredit pengembangan usaha pertanian suku bunga terjangkau	✓		✓	✓							✓			✓	✓				✓
	- Alokasi anggaran untuk membangun usaha pertanian, utamanya infrastruktur publik	✓			✓					✓	✓	✓		✓	✓					
	- Perlakuan khusus penerapan keringanan pajak untuk usaha pertanian	✓		✓	✓					✓	✓				✓			✓		✓
	- kebijakan untuk menghapuskan retribusi-retribusi yang memberatkan sektor pertanian	✓			✓					✓				✓	✓			✓		✓
	- kebijakan penghapusan PPN produk pertanian	✓			✓					✓					✓					✓
	- kebijakan investasi untuk merangsang swasta (PMA, PMDN) di bidang usaha pertanian	✓			✓					✓	✓				✓			✓	✓	✓
	- Kebijakan pemberian kredit ekspor produk pertanian	✓		✓	✓					✓					✓	✓				✓
	- Kebijakan pajak progresif untuk lahan	✓			✓	✓									✓			✓		✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Kebijakan industri																			
	- Kebijakan untuk mendorong pengembangan industri alsintan nasional	✓			✓				✓		✓							✓		✓
	- Kebijakan untuk mendorong pengembangan industri pupuk, pestisida, dan obat-obatan				✓				✓		✓							✓		✓
	- Kebijakan untuk mendorong pengembangan industri benih/bibit nasional				✓				✓		✓							✓		✓
	- Kebijakan pengembangan agroindustri perdesaan				✓	✓			✓		✓							✓		✓
3	Kebijakan Perdagangan/ Pemasaran																			
	- Kebijakan untuk menghapuskan pajak ekspor produk pertanian	✓			✓					✓					✓					✓
	- Kebijakan untuk melindungi produk pertanian (olahan dan non-olahan) domestik secara adil melalui pajak impor (bea masuk) untuk mencapai <i>fair trade</i> , dan <i>non-technical barriers</i>	✓			✓					✓					✓					✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	- Kebijakan penurunan pajak impor bagi barang modal dan input lain yang diperlukan oleh sektor pertanian yang belum diproduksi di dalam negeri	✓			✓					✓					✓					
	- Kebijakan dalam perbaikan sistem distribusi produk pertanian domestik				✓					✓				✓	✓			✓		✓
	- Kebijakan mendorong pembentukan bursa komoditas dan pasar lelang untuk transparansi pembentukan harga (<i>price discovery</i>)				✓					✓									✓	✓
	Kebijakan penyederhanaan prosedur ekspor guna memacu daya saing ekspor nasional				✓					✓				✓	✓			✓	✓	✓
	- Kebijakan mengefektifkan perwakilan di luar negeri untuk melakukan <i>market intelligence</i> dan promosi produk pertanian nasional				✓					✓				✓					✓	✓
	- Kebijakan dalam mendorong kerjasama pemasaran internasional				✓					✓									✓	✓
	- Kebijakan perbaikan struktur pasar domestik				✓					✓						✓		✓		✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	Kebijakan Pengembangan Infrastruktur																			
	- Kebijakan pengembangan infrastruktur publik di perdesaan (irigasi, farm road, air bersih, listrik)	✓			✓				✓	✓		✓						✓		✓
	- Kebijakan yang mendorong partisipasi swasta melakukan investasi di bidang infrastruktur	✓			✓							✓						✓		✓
	- Kebijakan untuk mendorong infrastruktur pasar seperti terminal agribisnis dan pasar lelang				✓					✓		✓				✓		✓		✓
5	Kebijakan Pengembangan Kelembagaan																			
	- Kebijakan pengembangan lembaga keuangan perdesaan	✓			✓										✓			✓		✓
	- Kebijakan pengembangan sistem perbankan di daerah (deregulasi perbankan)	✓			✓										✓			✓		✓
	- Kebijakan penumbuhan lembaga keuangan lokal	✓			✓										✓	✓		✓		✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	- Kebijakan pengembangan lembaga pengawas mutu produk-produk				✓		✓		✓	✓						✓		✓		✓
6	Kebijakan Pengembangan Inovasi dan Teknologi																			
	- Meningkatkan relevansi dan keterkaitan program litbang pertanian dengan kebutuhan pengguna (dunia usaha, petani) untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing dan perluasan pemasaran	✓		✓	✓					✓	✓			✓		✓		✓		✓
	- Mempertajam penyediaan inovasi teknologi pertanian untuk komoditas terpilih dengan pendekatan komprehensif terpadu, dan sasaran pencapaian terukur	✓			✓				✓	✓	✓									
	- Mendorong pengembangan inovasi teknologi pertanian berbasis wilayah, ekosistem, dan kearifan lokal serta berorientasi pasar dan ramah lingkungan				✓	✓			✓	✓	✓							✓		
	- Menjamin pemanfaatan inovasi hasil penelitian secara optimal melalui penguatan jaringan kerjasama lintas institusi	✓			✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓		✓		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	- Penguatan kelembagaan (distribusi, deliniasi dan keterkaitan fungsi institusi) penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK pertanian				✓				✓	✓	✓							✓		
	- Peningkatan jumlah, jenis dan kualitas pengelolaan anggaran litbang	✓			✓				✓						✓			✓		
	- Kebijakan penguatan kelembagaan penyuluhan				✓											✓		✓		✓
	- Kebijakan penumbuhan industri pengolahan perdesaan				✓						✓					✓		✓		✓
7	Kebijakan Pengembangan Organisasi Ekonomi Petani																			
	- Kebijakan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di perdesaan				✓					✓				✓		✓	✓	✓		✓
	- Kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi petani di perdesaan			✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓		✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	Kebijakan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Lingkungan																			
	- Kebijakan penegakan hukum secara konsisten dalam pemanfaatan sumberdaya alam	✓			✓	✓							✓		✓				✓	✓
	- Kebijakan untuk mencegah konversi lahan produktif	✓			✓	✓			✓			✓	✓						✓	✓
	- Penerapan kebijakan pajak tinggi untuk lahan tidur	✓			✓	✓						✓			✓				✓	✓
	- Tinjauan ulang Undang-Undang Pokok Agraria 1960	✓			✓	✓						✓	✓						✓	✓
	- Kebijakan penataan tata ruang wilayah	✓			✓	✓						✓	✓						✓	✓
9	Kebijakan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Agribisnis Daerah																			
	- Kebijakan penumbuhan sentra-sentra komoditas unggulan				✓					✓		✓		✓		✓			✓	✓
	- Kebijakan untuk mendorong tumbuhnya kawasan agroindustri terpadu (KAT)				✓				✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓	✓
	- Kebijakan penumbuhan industri dan jasa penunjang				✓				✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	Kebijakan Peningkatann Ketahanan Pangan																			
	- Kebijakan peningkatan ketersediaan pangan				✓					✓						✓	✓	✓		✓
	- Kebijakan penganekaragaman produksi pangan				✓					✓	✓	✓				✓	✓			✓
	- Kebijakan kredit ketahanan pangan (KKP)			✓	✓										✓	✓	✓	✓		✓
	- Kebijakan perdagangan				✓					✓		✓				✓	✓	✓		✓
	- Kebijakan penganekaragaman konsumsi	✓			✓		✓			✓						✓	✓	✓		✓
	- Kebijakan harga dasar gabah	✓			✓					✓						✓	✓	✓		✓
	- Kebijakan distribusi pangan	✓			✓					✓				✓		✓	✓	✓		✓
	- Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan		✓				✓													
11	Kebijakan Khusus																			
	- Beras	✓			✓					✓					✓	✓	✓	✓		✓
	- Gula	✓			✓					✓					✓	✓		✓		✓
	- Minyak Goreng	✓			✓					✓					✓	✓		✓		✓
	- Pakan	✓			✓					✓					✓	✓		✓		✓
	- Pupuk	✓			✓					✓					✓	✓		✓		✓
	- Upaya khusus penanggulangan kemiskinan	✓	✓												✓			✓		✓
	- Sumber Protein Rakyat (daging ayam, telur, susu, kedelai)	✓			✓					✓					✓	✓		✓		✓

Lampiran 2: Matriks Implementasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Pertanian 2005-2009

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Subprogram	Rencana Tindak
1. Membangun SDM aparatur profesional, petani mandiri dan kelembagaan pertanian yang kokoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur 2. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani. 3. Memperkuat kelembagaan pertanian 4. Revitalisasi penyuluhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan manajemen pembangunan yang bersih, transparan dan bebas KKN disertai penerapan <i>reward and punishment</i> 2. Peningkatan kompetensi dan moral SDM aparatur pertanian 3. Penyelenggaraan pendidikan pertanian bagi petani 4. Peningkatan peran serta masyarakat 5. Penguatan kelembagaan penyuluhan 6. Penguatan kelembagaan petani (ekonomi, sosial, advokasi, dan sumberdaya) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SDM Aparatur • Subprogram Pemberdayaan Petani • Subprogram Pengembangan Kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan SDM aparatur pertanian pusat dan daerah 2. Pelatihan teknis, manajemen dan pembinaan moral SDM aparatur pertanian 3. Peningkatan kewirausahaan petani melalui penyeteraan pendidikan 4. Pendidikan tingkat menengah untuk generasi muda tani 5. Penguatan kelembagaan penyuluhan 6. Pengembangan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan petani 7. Penguatan dan fasilitasi pembentukan kelembagaan petani 8. Penyelenggaraan kerjasama pengembangan SDM dan kemitraan pertanian dalam dan luar negeri

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Subprogram	Rencana Tindak
<p>2. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan konsolidasi pengelolaan lahan 2. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan 3. Membuka lahan baru, terutama di luar Jawa 4. Melakukan konservasi sumberdaya lahan 5. Melestarikan dan memanfaatkan sumber daya hayati 6. Mengurangi laju konversi lahan pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan investasi swasta 2. Penataan hak kepemilikan dan penggunaan lahan 3. Penataan sistem pewarisan lahan pertanian 4. Kebijakan Pewilayahan Komoditas 5. Penjabaran terhadap hukum adat dalam pengelolaan lahan 6. Penerapan konsep lahan abadi 7. Penerapan aturan hukum secara konsekuen 8. Pengelolaan sumberdaya lahan dan hayati secara berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Subprogram Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan • Subprogram pengembangan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan • Subprogram Pengembangan dan Diseminasi inovasi Pertanian mendukung Ketahanan Pangan • Subprogram Pengembangan Manajemen Pembangunan Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi dan produktivitas 2. Pencetakan sawah 3. Pengembangan tata guna lahan dan air 4. Inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya pertanian 5. Pengembangan teknologi peningkatan produktivitas lahan sawah dan lahan marjinal 6. Pengembangan teknologi dan rehabilitasi lahan marjinal serta daerah aliran sungai (DAS) 7. Pengembangan komoditas unggulan berdasarkan pewilayahan komoditas 8. Perumusan kebijakan penataan, pemanfaatan dan pajak progresif lahan

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Subprogram	Rencana Tindak
3. Memantapkan ketahanan dan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi dan ketersediaan 2. Meningkatkan distribusi pangan. 3. Meningkatkan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan 4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana mendukung ketahanan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas produksi pangan nasional 2. Pengamanan ketersediaan dan cadangan pangan 3. Pengamanan distribusi dan aksesibilitas pangan bermutu, aman, sehat, & halal 4. Diversifikasi produksi dan konsumsi pangan yang bertumpu pada sumberdaya lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Subprogram Peningkatan Produksi dan Ketersediaan Pangan • Subprogram Pengembangan Diversifikasi Produksi dan Konsumsi • Subprogram Penerapan Standar Kualitas dan Keamanan Pangan • Subprogram penurunan tingkat kerawanan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Advokasi penataan hak kepemilikan, sertifikasi dan pencegahan konversi lahan 10. Pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya lahan dan genetik pertanian 11. Penyelarasan kebijakan dan program pemanfaatan sumberdaya pertanian <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi produksi komoditas pangan pokok 2. Pengembangan sumber pangan lokal alternatif 3. Pengembangan pola konsumsi pangan lokal non-beras 4. Pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi 5. Pengembangan jalan usaha tani

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Subprogram	Rencana Tindak
		5. Kebijakan insentif produksi 6. Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Subprogram pengembangan dan diseminasi inovasi pertanian mendukung ketahanan pangan • Subprogram pengembangan manajemen pembangunan pertanian 	6. Fasilitasi sistem penyediaan sarana produksi 7. Pengembangan jaringan permodalan 8. Pengembangan perbenihan 9. Fasilitasi subsidi input produksi 10. Pengembangan jasa alsin pertanian 11. Perumusan dan penetapan kebijakan harga pangan 12. Pengelolaan tata niaga pangan 13. Pengamanan produksi pertanian dan perkarantinaan 14. Penyusunan dan penerapan standar kualitas dan keamanan pangan 15. Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi 16. Penguatan lembaga ketahanan pangan masyarakat 17. Pengembangan teknologi pengurangan kehilangan hasil

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Subprogram	Rencana Tindak
4. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna 2. Meningkatkan kapasitas dan memberdayakan SDM pertanian 3. Mengembangkan produk sesuai permintaan pasar 4. Meningkatkan efisiensi produksi dan tata niaga produk pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan teknologi, penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan pertanian 2. Peningkatan kapasitas manajerial petani dan pelaku usaha 3. Pengembangan "market.intelligent" 4. Peningkatan skala usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Subprogram Peningkatan Produksi, Kualitas Produk Pertanian dan Efisiensi Usaha • Subprogram Pengembangan Agroindustri Perdesaan • Subprogram Pengembangan Pemasaran Produk Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 18. Pengembangan teknologi sumberdaya lahan 19. Pengembangan teknologi pengolahan pangan tradisional 20. Pengembangan teknologi perbaikan mutu dan keamanan pangan 21. Penyelarasan kebijakan dan program peningkatan ketahanan pangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan peta wilayah komoditas 2. Pengembangan varietas/jenis ternak unggul. 3. Pengembangan teknologi perbaikan sistem produksi komoditas pertanian

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Subprogram	Rencana Tindak
	5. Meningkatkan diversifikasi usaha di tingkat wilayah sesuai keunggulan komparatif	5. Pengembangan kluster industri komoditas unggulan 6. Pengembangan produksi dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Diseminasi Inovasi Pertanian untuk meningkatkan Nilai Tambah & Daya saing • Subprogram Pengembangan Manajemen Pembangunan Pertanian • Subprogram Pengembangan Pertanian Komersial 	4. Pengembangan teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan 5. Pemanfaatan bioteknologi untuk perbaikan tanaman dan ternak 6. Penerapan teknologi pasca panen 7. Pengembangan agroindustri di kawasan sentra produksi 8. Pengembangan komoditas komersial spesifik lokasi 9. Bimbingan teknis dan penerapan GAP 10. Pengembangan kelembagaan dan informasi pasar 11. Pengkajian aspek sosial ekonomi dan kebijakan komoditas pertanian komersial

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Subprogram	Rencana Tindak
				<ol style="list-style-type: none">12. Pengamanan produksi pertanian komersial dan perkarantinaan13. Penyesuaian kebijakan tarif impor dan subsidi ekspor14. Pengembangan kerjasama dan perdagangan internasional15. Sosialisasi dan penerapan aturan perkarantinaan dan SPS (sanitary and phyto-sanitary).16. Peningkatan jumlah dan kualitas petugas penyidik/ pengawas mutu produk dan sarana pertanian17. Pengembangan lembaga sistem jaminan mutu18. Pengembangan pola kemitraan usaha di bidang pertanian19. Pengembangan pola contract farming20. Pengembangan promosi

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Subprogram	Rencana Tindak
<p>5. Menumbuhkembangkan usaha pertanian yang memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas dan memberdayakan SDM pertanian di perdesaan 2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana usaha pertanian pedesaan 3. Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna 4. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif 5. Mendorong diversifikasi produksi dan pengolahan hasil pertanian 6. Memperluas dan memanfaatkan basis produksi secara berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan, penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan pertanian 2. Pengembangan sarana dan prasarana usaha pertanian, lembaga keuangan dan pengolahan/pemasaran 3. Pengembangan inovasi pertanian dan diseminasi teknologi spesifik lokasi 4. Pengembangan kemitraan usaha yang saling menguntungkan 5. Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian 6. Pengembangan insentif usaha dan investasi bidang pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Subprogram Peningkatan Produksi, Kualitas Produk dan Efisiensi Usaha • Subprogram Pengembangan Agroindustri Pedesaan • Subprogram Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian • Subprogram Peningkatan Akses Petani Terhadap Sumberdaya Produktif • Subprogram Pengembangan Teknologi Pertanian • Subprogram Pengembangan Spesifik Lokasi • Subprogram Pengembangan kelembagaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan 2. Pengembangan industri perbenihan/perbibitan 3. Pengembangan jaringan informasi pasar di pedesaan 4. Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk pertanian di pedesaan 5. Pengembangan infrastruktur pedesaan 6. Fasilitasi investasi dan kemitraan usaha 7. Perlindungan usaha 8. Penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan 9. Pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi 10. Pengembangan lembaga pertanian pedesaan (lembaga keuangan, kios, jasa, koperasi, asosiasi)

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Subprogram	Rencana Tindak
<p>6. Membangun sistem manajemen pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan manajemen pembangunan pertanian yang profesional, bersih, peduli, transparan dan bebas KKN 2. Membangun sistem perencanaan pembangunan pertanian yang partisipatif dan integratif 3. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian; 4. Mengembangkan jaringan kerjasama antar institusi dan pemangku kepentingan lainnya 5. Merumuskan produk hukum di bidang pertanian yang berpihak pada petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesejahteraan pegawai disertai dengan penerapan reward dan punishment 2. Peningkatan kapasitas perencana di semua tingkatan 3. Penyelarasan pembangunan pertanian antar sektor dan wilayah 4. Peningkatan keterbukaan dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan pertanian 5. Perumusan kebijakan yang mengatur dan mendorong penerapan produk hukum yang berpihak pada petani 6. Pengembangan sistem dan mekanisme kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Subprogram Pengembangan Kelembagaan • Subprogram Pengembangan SDM • Aparatur • Subprogram Pengembangan Manajemen • Pembangunan Pertanian • Upaya Khusus Penanggulangan Kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan profesionalisme SDM aparatur melalui sistem insentif dan disinsentif secara tegas 2. Pendidikan, pelatihan, pendampingan perencanaan partisipatif 3. Penyelarasan kebijakan dan program secara partisipatif dengan instansi lain di Pusat dan Daerah 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, perencanaan dan pengawasan 5. Penyebarluasan informasi dan advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian 6. Perumusan dan advokasi kebijakan perlindungan petani

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Subprogram	Rencana Tindak
	<p>6. Membangun sistem evaluasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan pertanian yang efektif</p>	<p>7. Peningkatan evaluasi, pengawasan dan pengendalian manajemen pembangunan pertanian</p>		<p>7. Pengembangan sistem dan prosedur manajemen pembangunan pertanian yang efektif</p> <p>8. Pelaksanaan monev program pembangunan pertanian</p> <p>9. Peningkatan peran pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan pertanian</p> <p>10. Pelaksanaan dan perluasan jaringan kerjasama dalam dan luar negeri</p> <p>11. Koordinasi kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.</p>

Tabel 5: Proyeksi Produksi Beberapa Komoditas Tanaman Pangan 2005-2009

Tahun	Padi	Jagung	Kedele	Kacang Tanah	Ubi Kayu	Ubi Jalar
Produksi (ton)						
2004	54.340.000	11.350.000	730.000	830.000	19.510.000	1.880.000
2005	55.030.040	11.815.184	777.425	832.490	19.574.616	1.884.700
2006	55.717.916	12.312.218	827.930	835.404	19.653.298	1.890.354
2007	56.386.531	12.843.292	881.717	838.829	19.745.887	1.896.970
2008	57.051.892	13.385.861	938.998	844.281	19.815.385	1.904.558
2009	57.707.989	13.965.181	1.000.000	850.276	19.898.173	1.913.129
Laju (%)						
2005	1,27	4,10	6,50	0,30	0,33	0,25
2006	1,25	4,21	6,50	0,35	0,40	0,30
2007	1,20	4,31	6,50	0,41	0,47	0,35
2008	1,18	4,22	6,50	0,65	0,35	0,40
2009	1,15	4,33	6,50	0,71	0,42	0,45
Rataan (%)	1,21	4,23	6,50	0,48	0,39	0,35

Tabel 6: Sasaran Produksi Beberapa Komoditas Tanaman Sayuran Utama 2005-2009

Tahun	Kentang	Cabe	Bawang Merah	Kubis	Tomat	Wortel
Produksi (ton)						
2004	1.011.000	1.069.000	764.000	1.350.000	696.000	357.000
2005	1.049.154	1.101.391	818.767	1.401.435	729.957	373.172
2006	1.089.041	1.134.432	880.093	1.453.989	765.288	389.704
2007	1.130.550	1.168.125	948.689	1.507.496	801.887	406.500
2008	1.170.166	1.202.468	1.022.399	1.558.750	837.209	422.232
2009	1.210.944	1.235.656	1.104.658	1.610.345	873.356	437.939
Laju (%)						
2005	3,77	3,03	7,17	3,81	4,88	4,53
2006	3,80	3,00	7,49	3,75	4,84	4,43
2007	3,81	2,97	7,79	3,68	4,78	4,31
2008	3,50	2,94	7,77	3,40	4,40	3,87
2009	3,48	2,76	8,05	3,31	4,32	3,72
Rataan (%)	3,68	2,74	7,65	3,59	4,64	4,17

Tabel 7: Sasaran Produksi Beberapa Komoditas Tanaman Buah-Buahan Utama 2005-2009

Tahun	Pisang	Mangga	Jeruk	Durian	Pepaya	Nenas	Alpukat
Produksi (ton)							
2004	4.239.000	1.565.000	1.559.000	765.000	630.000	702.000	280.000
2005	4.529.531	1.675.176	1.617.307	823.523	665.154	739.346	297.752
2006	4.856.928	1.794.784	1.676.338	890.475	704.465	780.602	317.612
2007	5.225.021	1.925.623	1.735.513	967.590	747.648	825.721	339.750
2008	5.621.967	2.069.852	1.789.314	1.054.286	794.750	875.512	363.328
2009	6.066.831	2.231.095	1.840.309	1.145.587	847.760	931.807	389.524
Laju (%)							
2005	6,85	7,04	3,74	7,65	5,58	5,32	6,34
2006	7,23	7,14	3,65	8,13	5,91	5,58	6,67
2007	7,58	7,29	3,53	8,66	6,13	5,78	6,97
2008	7,60	7,49	3,10	8,96	6,30	6,03	6,94
2009	7,91	7,79	2,85	8,66	6,67	6,43	7,21
Rataan (%)	7,43	7,35	3,37	8,41	6,12	5,83	6,83

Tabel 8: Sasaran Produksi Beberapa Komoditas Tanaman Perkebunan 2005-2009

Tahun	Sawit	Karet	Kakao	Kopi	Kelapa	Gula	Tembakau	Lada
Produksi (ton)								
2004	12.384.798	1.851.192	601.272	720.635	3.261.544	2.020.000	218.604	94.834
2005	13.148.940	1.948.009	636.927	752.559	3.292.529	2.164.632	234.169	100.619
2006	13.961.545	2.049.306	672.341	785.672	3.321.503	2.318.970	250.795	107.009
2007	14.827.160	2.154.845	707.302	820.006	3.348.075	2.483.617	268.350	114.056
2008	15.750.892	2.242.978	742.667	855.676	3.371.846	2.659.209	287.081	121.574
2009	16.735.323	2.339.426	778.315	892.470	3.392.415	2.845.354	307.062	129.827
Laju (%)								
2005	6,17	5,23	5,93	4,43	0,95	7,16	7,12	6,10
2006	6,18	5,20	5,56	4,40	0,88	7,13	7,10	6,35
2007	6,20	5,15	5,20	4,37	0,80	7,10	7,00	6,59
2008	6,23	4,09	5,00	4,35	0,71	7,07	6,98	6,59
2009	6,25	4,30	4,80	4,30	0,61	7,00	6,96	6,79
Rataan (%)	6,21	4,79	5,30	4,37	0,79	7,09	7,03	6,48



Tabel 9: Sasaran Produksi Beberapa Komoditas Peternakan 2005-2009

Tahun	Sapi	Kerbau	Kuda	Babi	Kambing	Domba	Unggas	Telur	Susu
Produksi (ton)									
2004	380.060	45.520	1.598	185.652	69.628	84.550	1.396.383	1.051.365	596.304
2005	391.880	45.816	1.600	190.665	71.229	87.174	1.524.152	1.141.270	656.829
2006	403.911	46.123	1.601	195.527	72.761	89.905	1.654.467	1.240.793	723.825
2007	416.109	46.436	1.602	200.219	74.216	92.725	1.781.033	1.350.776	798.018
2008	428.467	46.757	1.603	204.724	75.589	95.393	1.901.253	1.468.684	880.213
2009	440.893	47.084	1.604	209.023	76.874	98.098	2.014.378	1.598.269	971.315
Laju (%)									
2005	3,11	0,65	0,10	2,70	2,30	3,10	9,15	8,55	10,15
2006	3,07	0,67	0,09	2,55	2,15	3,13	8,55	8,72	10,20
2007	3,02	0,68	0,08	2,40	2,00	3,14	7,65	8,86	10,25
2008	2,97	0,69	0,07	2,25	1,85	2,88	6,75	8,73	10,30
2009	2,90	0,70	0,06	2,10	1,70	2,84	5,95	8,82	10,35
Rataan (%)	3,01	0,68	0,08	2,40	2,00	3,02	7,61	8,74	10,25

Tabel 10: Sasaran Neraca Komoditas Pangan Utama 2005-2009

Tahun	Produksi (000 t)	Laju (%)	Konsumsi (000 t)	Laju (%)	Neraca (000 t)	% terhadap konsumsi
Beras						
2005	35.770	1,27	36.082	0,98	-313	-0,87
2006	36.217	1,25	36.483	1,11	-266	-0,73
2007	36.651	1,20	36.933	1,23	-282	-0,76
2008	37.084	1,18	37.425	1,33	-341	-0,91
2009	37.510	1,15	37.955	1,42	-445	-1,17
Rataan (%)		1,21		1,21		-0,89
Jagung						
2005	11.815	4,10	12.135	2,60	-320	-2,64
2006	12.312	4,21	12.478	2,83	-166	-1,33
2007	12.843	4,31	12.857	3,04	-14	-0,11
2008	13.386	4,22	13.270	3,21	116	0,87
2009	13.965	4,33	13.716	3,36	250	1,82
Rataan (%)		4,23		3,01		-0,28
Kedele						
2005	777	6,50	2.388	1,34	-1.611	-67,45
2006	828	6,50	2.426	1,56	-1.598	-65,87
2007	882	6,50	2.468	1,77	-1.587	-64,28
2008	939	6,50	2.516	1,93	-1.577	-62,68
2009	1.000	6,50	2.568	2,07	-1.568	-61,06
Rataan (%)		6,50		1,74		-64,27
Gula						
2005	2.165	7,16	3.299	2,95	-1.134	-34,38
2006	2.319	7,13	3.407	3,30	-1.088	-31,94
2007	2.484	7,10	3.531	3,62	-1.047	-29,66
2008	2.659	7,07	3.668	3,88	-1.008	-27,50
2009	2.845	7,00	3.818	4,11	-973	-25,48
Rataan (%)		7,09		3,57		-29,79

Tabel 11: Sasaran Ekspor Komoditas Pertanian 2005-2009 (U\$)

Tahun	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Total
2005	61.588.011	7.529.970.129	234.967.344	7.826.525.484
2006	56.147.121	8.434.804.372	268.796.989	8.759.748.483
2007	51.418.561	9.450.749.585	307.497.289	9.809.665.435
2008	47.263.744	10.591.585.442	351.769.501	10.990.618.687
2009	43.577.031	11.872.811.663	402.415.846	12.318.804.540
Rataan	51.998.894	9.575.984.238	313.089.394	9.941.072.526
Pertumbuhan (%/thn)	(7,31)	14,42	17,82	14,35
Total	311.993.354	47.879.921.190	1.565.446.970	49.705.362.629

Tabel 12: Sasaran Impor Komoditas Pertanian 2005-2009 (U\$)

Tahun	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Total
2005	1.754.019.780	1.189.147.659	998.862.453	3.942.029.891
2006	1.788.687.432	1.186.211.439	1.100.499.875	4.075.398.746
2007	1.832.595.803	1.183.282.468	1.214.337.150	4.230.215.421
2008	1.885.187.736	1.180.360.730	1.341.882.483	4.407.430.949
2009	1.946.024.891	1.177.446.206	1.484.831.428	4.608.302.525
Rataan	1.841.303.128	1.183.289.700	1.228.082.678	4.252.675.506
Pertumbuhan (%/thn)	2,74	(0,25)	12,16	4,23
Total	9.206.515.642	5.916.448.502	6.140.413.388	21.263.377.532

Tabel 13: Sasaran Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian, 2005-2009 (U\$)

Tahun	Tanaman Pangan	Perkebunan	Peternakan	Total
2005	(1.692.431.769)	6.340.822.470	(763.895.108)	3.884.495.593
2006	(1.732.540.311)	7.248.592.934	(831.702.886)	4.684.349.737
2007	(1.781.177.242)	8.267.467.117	(906.839.861)	5.579.450.014
2008	(1.837.923.992)	9.411.224.712	(990.112.981)	6.583.187.738
2009	(1.902.447.860)	10.695.365.456	(1.082.415.581)	7.710.502.015
Rataan	(1.789.304.235)	8.392.694.538	(914.993.283)	5.688.397.019
Pertumbuhan (%/thn)	3,10	17,17	10,42	24,62
Total	-8.946.521.174	41.963.472.688	-4.574.966.417	28.441.985.097

Lampiran 3:

1. Tanaman Pangan : Padi, Jagung, Kedele, Kacang Tanah, Ubi Kayu
2. Tanaman Hortikultura : Kentang, Cabe Merah, Bawang Merah, Mangga, Manggis, Pisang, Durian, Jeruk, Anggrek, Rimpang.
3. Tanaman Perkebunan : Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, Kakao, Jambu Mete, Lada, Tebu, Serat, Tembakau
4. Peternakan : Sapi Potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Itik, Babi.



Tabel 1: Sasaran Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian, 2005-2009 (%)

Tahun	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Perikanan	Kehutanan	Pertanian luas
2005	0,91	2,86	6,01	4,11	2,97	5,22	2,49	3,20
2006	1,03	2,93	6,19	4,28	3,17	5,39	2,65	3,40
2007	1,08	3,27	6,36	4,45	3,37	5,56	2,82	3,60
2008	0,99	3,29	6,32	4,42	3,37	5,52	2,79	3,60
2009	0,43	4,57	6,49	4,58	3,58	5,69	2,95	3,80
Rata-rata	0,89	3,38	6,27	4,37	3,29	5,48	2,74	3,52

Catatan: Pertumbuhan Pertanian Luas sama dengan target pertumbuhan yang ditetapkan dalam RPJMN (2004)

Tabel 2: Sasaran PDB Sektor Pertanian Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000, 2005-2009 (milyar)

Tahun	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Perikanan	Kehutanan	Pertanian luas
2005	76.500	45.800	47.511	28.149	197.960	31.803	23.830	253.592
2006	77.290	47.142	50.449	29.354	204.236	33.517	24.462	262.214
2007	78.123	48.683	53.656	30.661	211.123	35.380	25.152	271.654
2008	78.900	50.284	57.049	32.015	218.247	37.334	25.852	281.434
2009	79.236	52.581	60.753	33.482	226.053	39.460	26.615	292.128

Tabel 3: Sasaran Kebutuhan Investasi Sektor Pertanian Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 2005-2009 (milyar)

Tahun	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Total
2005	4.983	1.904	3.557	2.923	13.368
2006	5.013	1.954	3.818	3.069	13.854
2007	5.060	1.987	4.104	3.226	14.377
2008	5.124	2.051	4.355	3.364	14.893
2009	5.243	2.020	4.686	3.541	15.490
Rataan	5.085	1.983	4.104	3.224	14.397
Total	30.508	9.916	20.521	16.122	77.067
Pertumbuhan (%/thn)	1,31	1,53	7,93	5,28	3,97

Tabel 4: Sasaran Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian, 2005-2009

Tahun	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	Target *)	% Target
2005	27.224.152	3.376.871	6.329.315	4.342.799	41.273.136	44,10	94,23
2006	26.853.544	3.698.352	6.661.774	4.644.976	41.858.646	44,90	94,28
2007	26.521.174	4.059.749	7.038.345	4.993.138	42.612.406	45,50	94,91
2008	26.267.191	4.476.104	7.466.750	5.388.139	43.598.184	45,90	96,03
2009	25.913.000	4.924.066	7.903.428	5.801.321	44.541.816	46,20	97,47
Pertumbuhan (%/thn)	(1,23)	9,89	5,71	7,51	1,92	1,07	0,86

*) Target penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam RPJMN (Juta orang)

Tabel 14: Sasaran Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, 2005-2009 (Rp/orang/tahun)

Tahun	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Pertanian	% Pertumb.
2005	2,810,005	13,562,853	7,506,500	6,481,765	4,796,340	1.30
2006	2,878,205	12,746,759	7,572,908	6,319,516	4,879,183	1.73
2007	2,945,684	11,991,627	7,623,383	6,140,628	4,954,496	1.54
2008	3,003,747	11,233,877	7,640,406	5,941,754	5,005,874	1.04
2009	3,057,770	10,678,370	7,686,917	5,771,444	5,075,074	1.38
Rataan	2,939,082	12,042,697	7,606,023	6,131,021	4,942,193	1.40

Tabel 15: Sasaran Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pedesaan, 2005-2009 (%)

Tahun	Penduduk Miskin
2005	18.90
2006	17.92
2007	16.94
2008	15.95
2009	15.02

sukses

